



P U T U S A N

Nomor : 304 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **ANDI KARMAN**, beralamat di Jalan G Tambora No. 18, Soroako ;
- 2 **ABDUL MALIK**, beralamat di Bumi Daya Permai Blok D/21, Makassar ;
- 3 **HAERUDDIN HASAN**, beralamat di Jalan Danau Tempe No. 17, Wawondula ;

Selaku Wakil Kelompok, dalam hal ini bertindak baik untuk atas nama sendiri-sendiri maupun untuk dan atas nama Kelompok Buruh PT INCO Tbk., yang menderita kerugian akibat pemotongan upah yang dilakukan oleh PT INCO Tbk., ;

Ketiganya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ABDUL MUTTALIB, SH.**, dkk, para Advokat/Tim Pembela Hukum/Asisten Pembela Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang berkantor di Jalan Serigala No. 31 Makassar 90135, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2011 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat ;

M E L A W A N :

PT. INCO. Tbk., berkedudukan di Plaza Bapindo, Citibank Tower 22nd Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190 C.Q. **PT. INCO. TBK.**, (Kantor Perwakilan) berkedudukan di Jalan Penghibur No. 281, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan C.Q. **PT. INCO. TBK.** (Kantor Perwakilan) berkedudukan di Desa Sorowako, Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon



Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

A Kedudukan dan Kepentingan Hukum para Penggugat selaku Wakil Kelompok dalam kaitannya dengan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok ;

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu para Penggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum para Penggugat dalam mengajukan gugatan :

- 1 Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan melalui mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) atau dalam perkara a quo disingkat GPK oleh karena gugatan tersebut diakui oleh ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”* ;
- 2 Bahwa gugatan para Penggugat yang memiliki kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan ini diajukan lewat mekanisme gugatan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) dengan mempertimbangkan beberapa prinsip atau asas yakni prinsip peradilan cepat dan biaya murah serta prinsip akses pada keadilan (access to justice) sebagaimana diatur dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman :
 - a Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi :
“Pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” ;
 - b Pasal 5 Ayat (2) yang berbunyi :
“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah” ;
- 3 Bahwa para Penggugat adalah pengurus inti dari SERIKAT Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi Dan Umum Unit Kerja Inco Soroako (selanjutnya disingkat SP KEP UK Inco Soroako) sehingga pada prinsipnya memiliki legal standing untuk bertindak selaku Wakil Kelompok mewakili kelompoknya atau anggotanya hal mana dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi :



“Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya” ;

- b Pasal 25 Ayat (1) Huruf b UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang berbunyi :

“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial” ;

- 4 Bahwa pengajuan gugatan ini melalui mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Khusus angka (Romawi) II Pengadilan Hubungan Industrial huruf A nomor 1 sub bagian 2 (5) yang berbunyi :

“Gugatan yang diajukan oleh sekelompok Penggugat mengikuti ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok” ;

- 5 Bahwa para Penggugat sebagai Wakil Kelompok adalah merupakan orang yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri-diri sendiri juga sekaligus Wakil Kelompok dari sekelompok orang i.c. buruh PT. Inco, Tbk yang sama-sama menderita kerugian karena upah/gajinya dipotong dalam bentuk no pay for sift code, sick leave, dan/atau no pay (pengurang) oleh Tergugat pada bulan gaji November 2007 ;

Hal demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 yang berbunyi :

Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud ;

- 6 Bahwa para Penggugat adalah buruh PT. Inco, Tbk., juga adalah sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekertaris SP KEP UK Inco Soroako yang selama ini memperjuangkan hak-hak buruh di PT. Inco Tbk., oleh karena itu kejujuran dan kesungguhan para Penggugat tidak diragukan lagi untuk mewakili kepentingan hukum Anggota Kelompoknya dengan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok ;

Hal demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Huruf c PERMA No. 1 Tahun 2002 yang berbunyi :

“Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya” ;



- 7 Bahwa para Penggugat dalam hal ini Wakil Kelompok tidak dipersyaratkan mendapatkan kuasa khusus dari sub dan Anggota Kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berbunyi :

“Untuk mewakili kepentingan hukum Wakil Kelompok, Wakil Kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari sub kelompok” ;

- 8 Bahwa penyebutan satu persatu anggota kelompok bukan merupakan suatu keharusan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Huruf c PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang berbunyi :

“Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu” ;

- 9 Bahwa yang menjadi Definisi Kelompok atau yang dimaksud dengan Kelompok pada gugatan ini adalah kelompok buruh PT. Inco, Tbk yang menderita kerugian akibat pemotongan upah dalam bentuk no pay for sift code, sick leave, dan/atau no pay (pengurang) yang dilakukan oleh Tergugat pada bulan gaji November 2007 yang anggota kelompoknya berjumlah 1075 (seribu tujuh puluh lima) orang ;

- 10 Bahwa oleh karena jumlah anggota kelompok dalam perkara a quo sangat banyak yakni berjumlah 1.075 (seribu tujuh puluh lima) orang, maka beralasan pengajuan gugatan ini menggunakan mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif apabila digunakan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan” ;

- 11 Bahwa yang menjadi kesamaan fakta dan kesamaan dasar hukum antara para Penggugat sebagai Wakil Kelompok dengan Anggota Kelompoknya pada perkara a quo adalah adanya kerugian yang dialami oleh Wakil Kelompok dan anggota kelompok-nya yang timbul akibat pemotongan upah dalam bentuk no pay for sift code, sick leave, dan/atau no pay (pengurang) yang dilakukan oleh Tergugat pada bulan Gaji November 2007 yang secara rinci akan diuraikan selanjutnya pada bagian fakta hukum gugatan ini ;

Hal demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Huruf b PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berbunyi :



“Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa hukum dan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan hukum di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya” ;

12 Bahwa hak mengajukan gugatan melalui mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) sebagaimana tuntutan hak para Penggugat dalam perkara a quo telah diakui dalam praktek hukum di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan, antara lain :

- a Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 50/Pdt.G/2000/PN. Jakarta Pusat yaitu keterwakilan 139 tukang becak atas 5000 tukang becak lainnya di Jakarta yang terkena dampak SK Gubernur yang melarang becak beroperasi di DKI Jakarta ;
- b Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 550/Pdt.G/2000/PN. Jakarta Pusat yaitu keterwakilan 9 orang konsumen LPG atas 200.000 konsumen LPG se Jabotabek ;
- c Putusan Pengadilan negeri Pekanbaru Riau dalam perkara No. 32/Pdt.G/2000/PN.PBR yaitu keterwakilan Firdaus Basyir, S.H. atas 600.000 warga Riau yang terkena dampak land clearing dengan pembakaran di Riau ;
- d Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 83/Pdt.G/2002/ PN.JKT.PST yaitu keterwakilan 15 orang atas 8.300.000 orang korban banjir di DKI Jakarta pada tahun 2002 ;

13 Bahwa keberadaan para Penggugat yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum sebagai Wakil Kelompok dari Kelompoknya akan melakukan pengumuman secara luas (Notifikasi) melalui media cetak dan/ atau melalui pemasangan kertas pengumuman (Panflet) dengan ukuran poster (kertas A3) pada tempat-tempat yang telah biasa digunakan sebagai Papan Pengumuman oleh para Penggugat selaku Pimpinan organisasi Pekerja SP KEP UK Inco Soroako dan/ atau oleh Tergugat selaku Perusahaan tempat para Penggugat bersama Anggota Kelompoknya bekerja, yakni :

- a Papan Pengumuman pada Gate I Plant Site ;
- b Papan Pengumuman pada Gate VI Plan Site ;
- c Papan Pengumuman pada Inco Balintang Malili ;
- d Papan Pengumuman pada Eksternal Relation Town Admin ;
- e Papan Pengumuman pada Main Harapan ;

Selain itu, Notifikasi akan dilakukan pula melalui kertas selebaran yang dibagikan kepada semua Anggota Kelompok di tempat/lokasi kerjanya masing-masing,



sehingga memungkinkan semua Anggota Kelompok dapat mengetahui adanya gugatan ini, hal ini berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

14 Bahwa pilihan keluar (option out) akan dicantumkan dalam pernyataan keluar tertulis yang formatnya menyesuaikan dengan lampiran 1 PERMA No. 1 Tahun 2002 yang ditandatangani dan diajukan oleh anggota/anggota-anggota kelompok yang menyatakan keluar yang ditujukan kepada Kepala Panitera PHI pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar cq Panitera Pengganti perkara a quo dan para Penggugat cq Kuasa Hukum para Penggugat paling lama 14 (empat belas) hari setelah Notifikasi diumumkan, adanya pernyataan keluar dari anggota/anggota-anggota Kelompok berarti anggota/anggota-anggota tersebut secara hukum tidak lagi terikat dengan segala putusan maupun hasil dari Gugatan Perselisihan Hak dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) ini, hal demikian mengingat pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;

15 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang disertai dengan alasan-alasan gugatan secara lengkap, maka kami meminta agar Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) ini dapat ditetapkan dan dinyatakan sah, mengingat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;

B Uraian Fakta-Fakta Hukum ;

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya gugatan ini (fundamentum petendi) adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15-25 November 2007, para Penggugat (Wakil kelompok) dan Kelompoknya melakukan aksi mogok kerja di bawah naungan SP KEP PUK Inco Soroako ;
- 2 Bahwa sebelum pengajuan gugatan ini, telah dilakukan upaya hukum Perundingan Bipartit 1 pada tanggal 7 Desember 2007 dan Perundingan Bipartit 2 pada tanggal 13 Desember 2007, namun gagal dan tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya telah dilakukan pula upaya hukum Tripartit (Mediasi) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Timur hal mana Mediator telah mengeluarkan anjuran tertulis dengan No. 560/12/DNT-LT/I/2008 pada tanggal 7 Januari 2008, namun terhadap anjuran tertulis tersebut para Penggugat telah menolaknya melalui Surat Ketua FSP KEP Inco PT. Inco No. 087/A/FSP-KEP/UK.PTI/I/2008 ;



- 3 Bahwa sebagai tindak lanjut atas penolakan terhadap Anjuran Tertulis No. 560/12/DNT-LT/I/2008 tersebut, para Penggugat dan Kelompoknya kemudian mengajukan gugatan pada tanggal 23 November 2009 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar dengan nomor register No. 16/PHI.G/2009/PN. Mks. ;
- 4 Bahwa pada tanggal 3 Mei 2010 Majelis Hakim dalam perkara nomor register No. 16/PHI.G/2009/PN. Mks tersebut, menjatuhkan putusan yang bersifat negatif (berdasarkan surat kuasa dan/ atau gugatan yang cacat formil) yakni salah satu amarnya berbunyi “Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/NO)”, maka secara hukum Penggugat berhak dan dimungkinkan untuk mengajukan gugatan baru ;
- 5 Bahwa sebagai tindak lanjut atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar No. 16/PHI.G/2009/PN. Mks yang bersifat negatif tersebut, maka diajukanlah gugatan ini dan oleh karenanya pengajuan gugatan ini adalah sah menurut hukum ;
- 6 Bahwa aksi mogok kerja sebagaimana yang dimaksud pada petitum no. 1 (satu) di atas dilakukan oleh para Penggugat dan Kelompoknya dengan sah karena telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 137, Pasal 140 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakejaan serta tidak bertentangan dengan Pasal 139 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 3 Kepmennakertrans No. Kep-232/Men/2003 ;
- 7 Bahwa Aksi Mogok kerja adalah hak para Penggugat dan Kelompoknya sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh Pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :
“Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan” ;
- 8 Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 dan 30 November 2007 atau pada Bulan Gaji November 2007 Tergugat melakukan pemotongan upah terhadap para Penggugat dan Kelompoknya melalui mekanisme atau dalam bentuk “no pay for sift code, sick leave, dan/atau no pay (pengurang)” ;
- 9 Bahwa “no pay for sift code, sick leave, dan/atau no pay (pengurang)” adalah bentuk pemotongan upah dan merupakan tindakan balasan dari Tergugat terhadap para Penggugat dan Kelompoknya atas aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat dan Kelompoknya pada tanggal 15-25 November 2007 ;
- 10 Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemotongan upah terhadap para Penggugat dan Kelompoknya pada Bulan Gaji November 2007 adalah tidak sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melawan hukum sebab melanggar Pasal 144 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Pasal 144 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi :

“Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang” :

- a Mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan, atau
- b Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja ;

11 Bahwa hak para Penggugat dan Kelompoknya untuk tidak dikenakan pemotongan upah terkait aksi mogok kerja tanggal 15 s/d 25 November 2007 juga diperkuat dengan adanya Perjanjian Bersama (PB) tanggal 25 November 2007, dimana Tergugat diwajibkan untuk tidak melakukan tindakan balasan termasuk melakukan pemotongan upah atas aksi mogok tanggal 15-25 November 2007 sebelum ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal demikian berdasarkan klausula No. 8 (delapan) Perjanjian Bersama (PB) yang berbunyi :

“Berkaitan dengan mogok kerja ini, Pihak Pertama tidak melakukan tindakan-tindakan balasan dalam bentuk apapun juga, serta pengaruh negatif terhadap penilaian kinerja kepada pekerja dan pengurus Pihak Kedua selama mogok kerja dan setelahnya sepanjang berkaitan dengan mogok kerja ini, dengan pengecualian sebagai berikut :

- i Bagi karyawan yang diduga melanggar ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, termasuk Perjanjian Kerja Bersama, sebelum dan selama mogok kerja, akan dilakukan proses penyelesaian sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama, dan ;
- ii Mengenai masalah yang berhubungan dengan prinsip no work no pay akan diselesaikan secara tersendiri oleh para pihak melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

12 Bahwa akibat dari pemotongan upah tersebut para Penggugat dan Kelompoknya mengalami kerugian berupa kehilangan pendapatan pada Bulan Gaji November 2007 dengan rincian sebagai berikut :

DEPARTEMEN BALANTANG/MALILI

--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	BN	No Pay For Sift Code (Rp)	Sick Leave (Rp) (dalam ribuan)	Total (Rp)
1	ARIFUDDIN	7498	317685,00	96000,00	413685,00
2	HILAL MANNAN GGONGI	5838	696600,00	192000,00	888600,00
3	HAMZAR ULLAH	3340	522450,00,00	96000,00	618450,00,00
4	ALWI LAMBOLA	4127	858700,00	32000,000	1178700,00
5	JAMAL JAMALU	5398	608388,00	192000,00	800388,00
6	HADIS MANNAN G	3961	433941,00	96000,00	529941,00
7	SAPPE RISANI	5396	433941,00	96000,00	529941,00
8	AMMANG	4001	608388,00	192000,00	800388,00
9	SIMON SOLO	6488	732476,00	192000,00	924476,00
10	SOFYAN BASO	3665	348300,00	64000,00	412300,00
11	SIRLAS LETEAN	6797	53000,004,00	192000,00	722004,00
12	IKSAN TOHARI	6497	732476,00	192000,00	924476
13	NAHIR	5305	608388,00	192000,00	800388,00
14	NAJANG	3309	522450,00,00	96000,00	618450,00,00
15	ALOYSIUS SAKLIRESY	6635	578588,00	192000,00	770588,00
16	JAIS	8703	423580,00	192000,00	615580,00
17	SUKRI ATJA	6761	578588,00	192000,00	770588,00
18	JAMALUDDIN	5189	725668,00	192000,00	917668,00
19	BASRI BACO	4166	578588,00	192000,00	770588,00
20	NUKI	3498	696600,00	192000,00	888600,00
21	RAHIM ABDI	5273	578588,00	192000,00	770588,00
22	PAULUS PATABANG	6516	690128,00	192000,00	882128,00
23	ASRUL D KASIM	6746	522450,00	96000,00	618450,00
24	AMIR DG MANABA	3506	522450,00	96000,00	618450,00
25	DARAMAWAN IKSAN	5760	607908,00	96000,00	703908,00
26	AMIR SYAMSU	4085	534868,00	192000,00	726868
27	WAHYUDDIN	6745	522450,00	96000,00	618450,00
28	MUHAMMAD NASIR	4746	1098714,00	0	1098714,00
29	SUHADIR MAPPE	3302	366238,00	0	366238,00
30	MOH DAHLAN	3320	608388,00	192000,00	800388,00
31	BILLY M YAMIN	6674	242830,00	64000,00	306830,00
32	ANDI ABBAS ODDANG	4930	713248,00	192000,00	905248,00
33	ISHAK ISRAN	5552	760485	32000,000	1080485,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	19304544	5088000,00	24392544
---------------	-----------------	-------------------	-----------------

DEPARTEMEN CENTRAL MTCE

No	Nama	BN	No Pay For Sift Code (Rp)	Sick Leave (Rp)	Total (Rp)
1	AMOS KADONG	4557	849388,00	0	849388,00
2	DERITA	7719	361941,00	96000,00	457941,00
3	ENOS BUYANG	7637	241294,00	64000,00	305294,00
4	MARTINUS TOMANA	5156	548529,00	96000,00	644529,00
5	PAUL MATENGKENG	5212	1698776,00	0	1698776,00
6	TAJRUH	7684	120647,00	32000,00	152647,00
7	CHAERUDDIN LANDAHE	3513	810544,00	192000,00	1002544,00
8	ALI IMRAN	3488	96600,00	192000,00	288600,00
9	HAMBALI	3503	696600,00	192000,00	888600,00
10	BACHTIAR	8109	482588,00	192000,00	674588,00
11	SYARIFUDDIN	7873	361941,00	96000,00	457941,00
12	SULTHAN	3441	810544,00	192000,00	1002544,00
13	MUHAMMAD RAMSUL	7866	482588,00	192000,00	674588,00
14	HANUDDIN MAWELO	5135	424694,00	0	424694,00
15	ASHAR HAERUDDIN	7636	361941,00	96000,00	457941,00
16	GLORY YUSUF	7635	120647,00	32000,00	152647,00
17	ODDANG RIU	7683	241294,00	64000,00	305294,00
18	TAJUDDIN	4935	202636,00	32000,00	234636,00
19	SARIMUDDIN TINGKA	4666	405272,00	64000,00	469272,00
20	MARTHEN RANGAN	7911	120647,00	32000,00	152647,00
21	HENGKY LASAMPA	7642	120647,00	32000,00	152647,00
22	RUSE'	7642	241588,00	192000,00	433588,00
23	NASARUDDIN	7682	361941,00	96000,00	457941,00
24	YULIANUS RANTEMANGILIN	7643	361941,00	96000,00	457941,00
25	MARINUS SAMPERURU	8328	377340,00	192000,00	569340,00
26	MASYKUR	7912	482588,00	192000,00	674588,00
27	MUH MAKNUN ALWY	7702	482588,00	192000,00	674588,00
28	NAWIR	3376	795560,00	192000,00	987560,00
29	ACHIRUDDIN ACHMADY	8357	377340,00	192000,00	569340,00
30	PARMAN	8333	283005,00	96000,00	379005,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	DENIS DAWERI	8326	283005,00	96000,00	379005,00
32	YACOB TANDI AYU	8334	377340,00	192000,00	569340,00
33	ASTAM	8331	377340,00	192000,00	569340,00
34	AFIA ARDINAL	7919	482588,00	192000,00	674588,00
35	ARIF WIDODO	8325	377340,00	192000,00	569340,00
36	IRWAN	8332	377340,00	192000,00	569340,00
37	HANS LAYUK	7718	482588,00	192000,00	674588,00
38	SUWANDI HABIR	8755	377340,00	192000,00	569340,00
39	HENDRIK MENDILA	8857	302706,00	96000,00	398706,00
40	DANNY ABRAHAM	7703	482588,00	192000,00	674588,00
41	SABIL B	8330	377340,00	192000,00	569340,00
42	MUHAMMAD SAINI	7703	361941,00	96000,00	457941,00
43	SAUKANI	5587	397780,00	64000,00	461780,00
44	YUSUF TALEBONG	4410	679508,00	0	679508,00
45	RUBIAR ISMAIL	5575	377804,00	64000,00	441804,00
46	BIRING RANDA	5577	489987,00	96000,00	585987,00
47	ALHISER ALAMAKO	7552	241294,00	64000,00	305294,00
48	TAHIR	7547	361941,00	96000,00	457941,00
49	ASMAWI NUSI	7798	241294,00	64000,00	305294,00
50	TAUFIK	7525	361941,00	96000,00	457941,00
51	WELLI	7976	403608,00	192000,00	595608,00
52	RISAL NURIONO	7964	201804,00	64000,00	265804,00
53	RASTI ROMBE	7967	302706,00	96000,00	398706,00
54	ZULKARNAIN	7546	361941,00	96000,00	457941,00
55	JAMALUDDIN	6368	597268,00	192000,00	789268,00
56	MUHAMMAD ARAS	8352	423580,00	192000,00	615580,00
57	KASRUL	7874	482588,00	192000,00	674588,00
58	SIMON SATTUNG	5139	345064,00	64000,00	409064,00
JUMLAH			24253213,00	6976000,00	31229213,00

DEPARTEMEN ENGINEERING

No	Nama	BN	No Pay For Sift Code (Rp)	Sick Leave (Rp)	Total (Rp)
1	MUHAMMAD JUFRI	7827	236208,00		236208,00
2	LALU	7555	890132,00		890132,00



	DIDIT PROGON ANTO				
3	AGUNG SETYAW AN	8346		890132,00	890132,00
4	NATALI A PABARA	8374		661527,00	661527,00
5	SARA	8373		661527,00	661527,00
6	HENDRI K SALEMP ANG	7998		233480,00	233480,00
7	BOLLY	6166		127168,00	127168,00
8	YUDIT SENTIKE	7495		126013,00	32000,00 158013,00
9	SYARIFU DDIN	5899		849388,00	849388,00
10	SULIAST RI SUCIAN ASTASIA	6955		126012,00	126012,00
11	DEDI SUPRIAD I	6199		1528896,00	1528896,00
12	GOENOA WAN KUKUH TJOKRO	7706		295073,00	295073,00
13	MURMA N	8343		345064,00	345064,00
14	WAHYUDI AZIKIN	8378	528906,00		528906,00
15	ATMA	7999	700440,00		700440,00
16	IWAN IGNATIU ADAM	5981	1084258,00		1084258,00
17	HAMAM SUBEKTI	7696	590146,00		590146,00
18	ANASUL	7485	1335198,00		1335198,00
19	EVY MALLA	7770	555432,00		555432,00
JUMLAH			13815107,00	32000,00	13847107,00

DEPARTEMEN FABRICATION

No	Nama	BN	No Pay For Sift Code (Rp)	Sick Leave (Rp)	Total (Rp)
1	EDWIN YULIUS	7654	221780,00	64000,00	285780,00
2	SION MARKUS	7675	221780,00	64000,00	285780,00
3	SIMON BANGGA	6386	517596,00	96000,00	613596,00
4	MA'ADING	6813	537340,00	192000,00	729340,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	MUH BASRI	4195	696600,00	192000,00	888600,00
6	THOMHIS TOLAMPI	6348	625204,00	192000,00	817204,00
7	SYAHRIR SYARIFUDDIN PU	5867	696600,00	192000,00	888600,00
8	JONI TANGKE	5884	696600,00	192000,00	888600,00
9	SABRI	6822	597268,00	192000,00	789268,00
10	ADWIN ALDRIN	6818	625204,00	192000,00	817204,00
11	HAMZAH RUDDIN RACHMAN	7658	517596,00	96000,00	613596,00
12	EMIL SALIM CHAERUDDIN	7657	221780,00	64000,00	285780,00
13	HENDRA JAYA PO'ENDEY	7722	221780,00	64000,00	285780,00
14	BENYAMIN BUNTU	6968	332670,00	96000,00	428670,00
15	IHWAN	7660	221780,00	64000,00	285780,00
16	ROSIHAN	6814	312602,00	64000,00	376602,00
17	HASAN SIRA	5143	326658,00	64000,00	390658,00
18	SUHARJI	7705	221780,00	64000,00	285780,00
19	BARANA BERNANDUS	6375	289294,00	64000,00	353294,00
20	YAMAN SIO SIMON	6383	312602,00	64000,00	376602,00
21	TAMBARU TANDILINO	6820	625204,00	192000,00	817204,00
22	PARES PABARA	7222	403005,00	96000,00	499005,00
23	SUMBANG PETRUS	5990	534936,00	96000,00	630936,00
24	IRSYAM	7341	403005,00	96000,00	499005,00
25	MANSAR	6823	447951,00	96000,00	543951,00
26	PATATTAN NATANIEL	6385	489987,00	96000,00	585987,00
27	RUBEN MIAN	1230	696600,00	192000,00	888600,00
28	YOHANIS PALAWAN	5186	696600,00	192000,00	888600,00
29	SARDIN BACO	1229	696600,00	192000,00	888600,00
30	DENIS SUPRI	7519	361941,00	96000,00	457941,00
31	I MADE SUASTAWA	6226	625204,00	192000,00	817204,00
32	JULCHAIDAR ANHAR	7168	508672,00	192000,00	700672,00
33	JENISON SOOKA	6224	537340,00	192000,00	729340,00
34	JOHN BALIALLO	7668	443560,00	192000,00	635560,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	MAHARUDDIN	7661	690128,00	192000,00	882128,00
36	HAMRAN	6816	289294,00	64000,00	353294,00
37	WAHYUDDIN	5956	696600,00	192000,00	888600,00
38	RUBEN TOYANG	5154	696600,00	192000,00	888600,00
39	WAHIDIN ZAKARIA	7561	482588,00	192000,00	674588,00
40	FERDINANDUS PATABANG	7580	482588,00	192000,00	674588,00
41	DARMAWAN	6164	625204,00	192000,00	817204,00
42	ANDARIAS	5153	522450,00	96000,00	618450,00
43	KAMLUDDIN	6821	597268,00	192000,00	789268,00
44	VICTOR MATAPU	7659	110890,00	32000,00	142890,00
45	YESAYA	6810	468903,00	96000,00	564903,00
46	PATAHUDDIN	7169	221780,00	64000,00	285780,00
47	THOMAS LAWODI	6347	326658,00	64000,00	390658,00
48	KARDIN	7287	624860,00	0	624860,00
49	YOSIAS DALI	6819	468903,00	96000,00	564903,00
50	MARTEM SULU PAREMDEN	5885	696600,00	192000,00	888600,00
JUMLAH			23886433,00	6432000,00	30318433,00

DEPARTEMEN LOGISTICS

No	Nama	BN	No Pay For Sift Code (Rp)	Sick Leave (Rp)	Total (Rp)
1	BASRI LISO	4039	904410,00	32000,000	1224410,00
2	ASFAR	8637	317685,00	96000,00	413685,00
3	TASMAN AKBAR	7621	221780,00	64000,00	285780,00
4	ISHAR	8226	423580,00	192000,00	615580,00
5	HASAN RUSLI	201	578588,00	192000,00	770588,00
6	ADHE SIGIT RAMDANI	8225	423580,00	192000,00	615580,00
7	ANWAR SAMAD	4017	573412,00	192000,00	765412,00
8	TAHRUDDIN	6435	902788,00	0	902788,00
9	EDI SUDARTO	7980	556750,00	32000,000	876750,00
10	FIRMAN RASYID	7166	607075,00,00	32000,000	927075,00
11	YUSRI	7983	445400,00	192000,00	637400,00
12	JASMAN PAWAKKA	5704	760485,00	32000,000	1080485,00
13	SULTAN	7466	607075,00,00	32000,000	927075,00
14	SYAMRUN	7165	485660,00,00	192000,00	677660,00
15	TONY SAMPE	7986	445400,00	192000,00	637400,00
16	YUSUF	7870	423580,00	192000,00	615580,00
17	KUSWOYO WAKIDI	7212	607075,00,00	32000,000	927075,00
18	WAHYU PRABOWO	7467	443560,00	192000,00	635560,00
19	MASHUD BAGENDA	4012	433941,00	96000,00	529941,00
20	DAUD SONGLI	453	578588,00	192000,00	770588,00
21	HADIL	4027	578588,00	192000,00	770588,00
22	EWIN EKA PUTRA	7089	461872,00	192000,00	653872,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	KIN GAVEN ROSO	7620	443560,00	192000,00	635560,00
24	HASRIL SYALRIF	7618	349803,00	96000,00	445803,00
25	ARNIATI	8117	407492,00	192000,00	599492,00
26	ASEP WIDODO	8114	211790,00	64000,00	275790,00
27	MARLINA SILAMBA	8118	423580,00	192000,00	615580,00
28	JURIANI MAHADA ALI	8121	317685,00	96000,00	413685,00
29	AFRIANI	7955	423580,00	192000,00	615580,00
30	ANDI NUR	7956	423580,00	192000,00	615580,00
31	YARI ALAMAKO	7619	443560,00	192000,00	635560,00
32	IWAN ARIFIN	7469	298634,00	64000,00	362634,00
33	HARTAWAN SYAMSUL BAHRI	7163	485660,00,00	192000,00	677660,00
34	SYAMSUL BAHRI	8515	578588,00	192000,00	770588,00
35	OSKAR KATILI	5876	679508,00	0	679508,00
36	MASJAYA	7167	485660,00,00	192000,00	677660,00
37	HYDIR	7979	445400,00	192000,00	637400,00
38	RAMLI LISI	7985	556750,00	32000,000	876750,00
39	ARMIN	7987	556750,00	32000,000	876750,00
JUMLAH			21135586,00	7552000,00	28687586,00

DEPARTEMEN MEM GUNUNG BATU

No	Nama	BN	No Pay For Sift Code (Rp)	Sick Leave (Rp)	Total (Rp)
1	ABD MADJID SUPU	4060	696600,00	192000,00	888600,00
2	ENDRO BM	6502	696600,00,00	192000,00	888600,00
3	IDRIS	6498	696600,00	192000,00	888600,00
4	HERMAN HAULUSSY	4820	348300,00	64000,00	412300,00
5	BALIGU KANNA	1246	489987,00	96000,00	585987,00
6	BASIR	7865	110890,00	32000,00	142890,00
7	SYARIEF	6509	348300,00	64000,00	412300,00
8	AGUS SALIM	8651	201804,00	64000,00	265804,00
9	YOEL TANGDILIN TING	7828	461872,00	192000,00	653872,00
10	YAN LEWI	4896	696600,00	192000,00	888600,00
JUMLAH			4747553,00	128000,000,00	6027553,00

DEPARTEMEN MEM - PLANT SITE

No	Nama	BN	No Pay For Sift Code (Rp)	Sick Leave (Rp)	Total (Rp)
1	SUMADI	5302	522450,00	96000,00	618450,00
2	DANIEL LAPU LOLONGAN	4780	696600,00	192000,00	888600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	RAHMAN	7744	423580,00	192000,00	615580,00
4	SYUKUR MASARRANG	7739	361941,00	96000,00	457941,00
5	YONAS BOYONG	7751	120647,00	32000,00	152647,00
6	DONALD SIHOMBING	7567	361941,00	96000,00	457941,00
7	SUKMA MAHARDING	8642	318294,00	96000,00	414294,00
8	EDUAR	6489	653316,00	192000,00	845316,00
9	DARMAN PAKABU	6531	537340,00	192000,00	729340,00
10	DANIEL RUBA'	6507	573412,00	192000,00	765412,00
11	SUDARTO	4636	696600,00	192000,00	888600,00
12	M THAMRIN B	5247	578588,00	192000,00	770588,00
13	QUNN ERLANGGA	7616	708624,00	0	708624,00
14	YUSUF DAHLAN	5768	430059,00	96000,00	526059,00
15	SUPARNO KRIS MUKADAR	6536	549357,00	96000,00	645357,00
16	BAHARUDDIN	7614	679508,00	0	679508,00
17	SADRI	5909	415076,00	0	415076,00
18	SABAN ACHMAD	5913	295260,00	0	295260,00
19	MASE MUNIR	5912	472416,00	0	472416,00
20	JUMARDIN LABARO	5773	1528896,00	0	1528896,00
21	AZWAR ANAS	7617	298634,00	64000,00	362634,00
22	YULIANUS	3725	522450,00	96000,00	618450,00
23	MUHAMMAD SUDIRIYAWAN	7572	423580,00	192000,00	615580,00
24	JUNANSI SIBALA	7969	423580,00	192000,00	615580,00
25	YOHANIS SAMBO	6780	653316,00	192000,00	845316,00
26	YAKOBUSKABA	8649	403608,00	192000,00	595608,00
27	ABD DJALIL BANGGU	868	374565,00	96000,00	470565,00
28	IBRAHIM	4810	522450,00	96000,00	618450,00
29	YOHANIS MINGGU	4657	696600,00	192000,00	888600,00
30	IRWAN	6533	537340,00	192000,00	729340,00
31	ELYESER RAPALANGI	7741	482588,00	192000,00	674588,00
32	SALAMBA FRANSISKUS	5908	696600,00	192000,00	888600,00
33	SAMUEL PAYUNG	4843	696600,00	192000,00	888600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	SESA BLASIU S	5272	433941,00	96000,00	529941,00
35	ANTONI RADIUS SISWINA	6755	489987,00	96000,00	585987,00
36	SALMON NDEOHA	6524	433941,00	96000,00	529941,00
37	YOHANIS ANGGO	7669	332670,00	96000,00	428670,00
38	MUHAMMA D ALI	7574	361941,00	96000,00	457941,00
39	MADJID HUSAIN	3234	696600,00	192000,00	888600,00
40	CHANDRA	7753	317685,00	96000,00	413685,00
41	ANTON ARIS	5906	522450,00	96000,00	618450,00
42	EUCKLID	7634	482588,00	192000,00	674588,00
43	ROBI	7629	380583,00	96000,00	476583,00
44	VIKTOR PARI	7651	504048,00	192000,00	696048,00
45	MARTHINUS M NAGUL	7749	380583,00	96000,00	476583,00
46	JEMMY FAISAL M	7673	443560,00	192000,00	635560,00
47	BARTO	6532	403005,00	96000,00	499005,00
48	AWALUDDI N A	7613	504048,00	192000,00	696048,00
49	RAMLI	4907	522450,00	96000,00	618450,00
50	GRESA F ALBERTO	8639	106098,00	32000,00	138098,00
51	HARUN PATAKDUN GAN	7627	241294,00	64000,00	305294,00
52	MARTHEN TANGKEAL LO	3284	696600,00	192000,00	888600,00
53	ALINUR	6815	289294,00	64000,00	353294,00
54	YUSUF MUSTAQIM	7860	423580,00	192000,00	615580,00
55	SAHUDDIN BAKRI	2180	522450,00	96000,00	618450,00
56	SYAMSUDDI N	286	378036,00	96000,00	474036,00
57	KAMARUDD IN	5276	578588,00	192000,00	770588,00
58	ENOS PAYUNG	8645	201804,00	64000,00	265804,00
59	FIRDAUS ALLORERU NG	8664	318294,00	96000,00	414294,00
60	DEDY PALUARAN	7857	317685,00	96000,00	413685,00
61	ALI MOKO	7859	423580,00	192000,00	615580,00
62	MAHYUDDI N	7862	233202,00	64000,00	297202,00
63	DADANG HIDAYAT	7863	233202,00	64000,00	297202,00
64	MARADU SILITONGA	6504	696600,00	192000,00	888600,00
65	SUKRI	2937	696600,00	192000,00	888600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	LAMBA SARUNGAL LO	3675	915595,00	32000,000	1235595,00
67	JHONIS PARURA	1002	915595,00	32000,000	1235595,00
68	JHONY RAMPENGA N	6523	123239,00	32000,00	155239,00
69	TAMSIR	5277	732476,00	192000,00	924476,00
70	ABDUL TALIB KUNNA	6515	696600,00	192000,00	888600,00
71	RASDIN	5910	732476,00	192000,00	924476,00
72	SOLIKHIN	7569	597268,00	192000,00	789268,00
73	RUSNI HASENG	289	907085,00	32000,000	1227085,00
74	MAXLIBERT I	7628	380583,00	96000,00	476583,00
75	DONNY DEDIY	7752	423580,00	192000,00	615580,00
76	ESRON	6514	608388,00	192000,00	800388,00
77	LUKAS PANTAS	5676	915595,00	32000,000	1235595,00
78	IYUS SYAMSUDDI N	5280	549357,00	96000,00	645357,00
79	SILAHUDDI N	6521	915595,00	32000,000	1235595,00
80	PARURA	5300	884010,00	0	884010,00
81	LUTHER PARINDING	4539	732476,00	192000,00	924476,00
82	IRWAN	4359	915595,00	32000,000	1235595,00
83	MUSLIMIN	1350	915595,00	32000,000	1235595,00
84	TOTOK MISYANTO	7631	482588,00	192000,00	674588,00
85	JABAR JAINUDDIN	4770	696600,00	192000,00	888600,00
86	RUPIT	7632	482588,00	192000,00	674588,00
87	SYAMSUL BACHRI	8430	482588,00	192000,00	674588,00
88	JONI PARINDING	8646	403608,00	192000,00	595608,00
89	ACHMAD	5669	522450,00	96000,00	618450,00
90	BENYAMIN BONTONG	5836	696600,00	192000,00	888600,00
91	ASWAR ARIESA	7736	423580,00	192000,00	615580,00
92	SUHARMAD IN	7742	423580,00	192000,00	615580,00
93	HERMAN TA'BA	6493	608388,00	192000,00	800388,00
94	AMAN HADI	6506	732476,00	192000,00	924476,00
95	HASWAL HALIM	8644	403608,00	192000,00	595608,00
96	MUNIR SYAM	7576	597268,00	192000,00	789268,00
97	MAWARDI	6505	732476,00	192000,00	924476,00
98	TAMRIN	7565	241294,00	64000,00	305294,00
99	GAPPAR	7754	423580,00	192000,00	615580,00
100	PETRUS	6484	578588,00	192000,00	770588,00



	BARRI				
101	YUSUF BARU	4924	732476,00	192000,00	924476,00
102	TOMBANG	2609	732476,00	192000,00	924476,00
103	SINTO TIARNO	6522	657400,00	192000,00	849400,00
104	ANTHON PATABANG	5782	764448,00	0	764448,00
JUMLAH			55902571,00	1536000,000	71262571,00

No	Nama	BN	No Pay For Sift Code (Rp)	Sick Leave (Rp)	Total (Rp)
1	YUNUS BAAN	4318	885780,00	0	885780,00
2	DANIEL KOMBONG	4317	1181040,00	0	1181040,00
3	YUSUF RUSWANDI	7426	885780,00	0	885780,00
JUMLAH			2952600,00	0	2952600,00

DEPARTEMEN MINE HARAPAN

No	Nama	BN	No Pay For Sift Code (Rp)	No Pay (Rp)	Total (Rp)
1	SUARDI HAMID	7784	540945,00	32000,000,00	860945,00
2	MANSYUR	6661	760485,00	32000,000	1080485,00
3	YADI KADAMA	7895	432756,00	192000,00	624756,00
4	ABDUL TADDA	6947	608388,00	192000,00	800388,00
5	MASLIYADI	6986	529702,00	96000,00	625702,00
6	MANZUR SALATI	7349	466404,00	192000,00	658404,00
7	SILAS	7946	445400	192000,00	637400,00
8	TAUFIK DJAMIL	7266	466404,00	192000,00	658404,00
9	YACOB TANGKELA YUK	7188	485660,00	192000,00	677660,00
10	MUHAMMA D ALWI	7926	334050	96000,00	430050,00
11	ISKANDAR	7229	466404,00	192000,00	658404,00
12	RAHMAN RANTESALU	6718	485660,00	192000,00	677660,00
13	ANWAR PANCASILA	6334	608388,00	192000,00	800388,00
14	PETRUS R PAREALLA	6766	602940,00	192000,00	794940,00
15	EMANUEL BORO BEBE	6653	456291,00	96000,00	552291,00
16	NICO PAJULA	6984	565016,00,00	192000,00	757016,00
17	NAHIRUDDIN	5945	608388,00	192000,00	800388,00
18	HARIYANTO	6040	456291,00	96000,00	552291,00
19	ISHAK JAYA	6155	608388,00	192000,00	800388,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	PERY	5928	608388,00	192000,00	800388,00
21	DARWIS	7278	466404,00	192000,00	658404,00
22	ANDI NYIWI	6983	141254,00	32000,00	173254,00
23	AHMAT	8416	428476,00	192000,00	620476,00
24	JAMALI AHMADI	7236	466404,00	192000,00	658404,00
25	MAS'UD	8388	321357,00	96000,00	417357,00
26	IRWAN TANRASUL A	6367	760485,00	32000,000,00	1080485,00
27	YANBANNE	6765	760485,00	32000,000,00	1080485,00
28	MASHAR SURAJA	6849	608388,00	192000,00,00	800388,00
29	DANIEL BELA	6944	706270,00	32000,000,00	1026270,00
30	LUKAS BURUK	6717	607075,00,00	32000,000,00	927075,00
31	AHMAD KHUSAIRI	6981	706270,00	32000,000,00	1026270,00
32	HERAWAN KASO	6675	607075,00,00	32000,000,00	927075,00
33	HERIYADI JAFAR	7441	607075,00,00	32000,000,00	927075,00
34	THOMAS PALODANG	6656	753675,00	32000,000	1073675,00
35	ANNAS ANTHON	7843	556750,00	32000,000	876750,00
36	MUH JUFRI SIKI	6845	760485,00	32000,000	1080485,00
37	RANTE DENDANG	7353	583005,00	32000,000	903005,00
38	HERAWAN MARYADIN	8398	428476,00	192000,00	620476,00
39	ANDI SUBRIYADI	8393	535595,00	32000,000	855595,00
40	ASRONI	6975	706270,00	32000,000	1026270,00
41	DARIUS NGAMPANG	7953	445400,00	192000,00	637400,00
42	ARHAM	6339	608388,00	192000,00	800388,00
43	BURHANUD DIN KASO	6867	607075,00,00	32000,000	927075,00
44	DARWIS	6667	706270,00	32000,000	1026270,00
45	YOSMILYAN	7352	583005,00	32000,000	903005,00
46	YONATHAN FRANS	8402	535595,00	32000,000	855595,00
47	FANDY GANING	8396	535595,00	32000,000	855595,00
48	SAMUDDIN DG SUJUD	7891	565750,00	32000,000	885750,00
49	ARISAL	7931	556750,00	32000,000	876750,00
50	SALIM GAFFAR	7840	540945,00	32000,000	860945,00
51	FATHULLAH	8395	535595,00	32000,000	855595,00
52	MUSKAMAL RAHAMPU	6333	608388,00	192000,00	800388,00
53	FATHUL HADI GANING	7200	592245,00	32000,000	912245,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	NIKA LIMBU	7850	445400,00	192000,00	637400,00
55	ALEXANDER BANDASO	6913	596135,00	32000,000	916135,00
56	ANSHAR	7882	445400,00	192000,00	637400,00
57	NARDUS PALEMPANGAN	6673	706270,00	32000,000	1026270,00
58	DAUD KAMOLO	1251	1065360,00	32000,000	1385360,00
59	SANDI TANDI	7209	587625,00	32000,000	907625,00
60	ANDERONIKUS DUMA	6998	565016,00,00	192000,00	757016,00
61	MUH IRVAN	7281	583005,00	32000,000	903005,00
62	GULIT MALAHA	7361	556750,00	32000,000	876750,00
63	RIZAL	7238	466404,00	32000,000	786404,00
64	YUNUS DIANTO	6449	760485,00	32000,000	1080485,00
65	ROSMILWAN	7210	596135,00	32000,000	916135,00
66	IRDAM TAUFIK	7271	583005,00	32000,000	903005,00
67	TANGDIAWI PAURU	7835	556750,00	32000,000	876750,00
68	RUMPANG PAULUS	6042	1045665,00	32000,000	1365665,00
69	HASRUL HAKIM	7268	583005,00	32000,000	903005,00
70	YESAYAS J NURLAT	6447	608388,00	192000,00	800388,00
71	NIRFAN	7282	583005,00	32000,000	903005,00
72	SUPRIADIN	6332	836532,00	192000,00	1028532,00
73	SOAMING	3900	760485,00	32000,000	1080485,00
74	PAULUS KRIS	6295	760485,00	32000,000	1080485,00
75	YUNUS MANNENG	7263	583005,00	32000,000	903005,00
76	SURYADI	6472	760485,00	32000,000	1080485,00
77	KATMAN NANDENG	7844	445400,00	192000,00	637400,00
78	ONESIMUS PASONGLI	7249	583005,00	32000,000	903005,00
79	RASLAH KUNNU	7924	540945,00	32000,000	860945,00
80	ANTONIUS MANGANDO	6649	937475,00	32000,000	1257475,00
81	ASHARUN	7786	556750,00	32000,000	876750,00
82	MARKUS TANGRAPA	4870	608388,00	192000,00	800388,00
83	DEDIY	4996	608388,00	192000,00	800388,00
84	ABRAHAM PRAYUDIARDI	6974	565016,00,00	192000,00	757016,00
85	ROBERT	6979	423762,00	96000,00	519762,00
86	AKBAR M	8445	535595,00	32000,000	855595,00
87	MUHAMMAD ARIF	8437	321357,00	96000,00	417357,00
88	HADE	189	456291,00	96000,00	552291,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	AMRAN	7311	466404,00	192000,00	658404,00
90	AKMAL	6940	456291,00	96000,00	552291,00
91	SULAIMAN ALAMSYAH	5927	608388,00	192000,00	800388,00
92	SUPARMAN TURUSI	7030	565016,00,00	192000,00	757016,00
93	HOTMAN	6967	476908,00	192000,00	668908,00
94	YUSLAN	6847	602940,00	192000,00	794940,00
95	EDY PAHA	6592	456291,00	96000,00	552291,00
96	OBET	7832	445400,00	192000,00	637400,00
97	ARIFUDDIN TIKU PADANG	6636	426144,00	64000,00	490144,00
98	ARIVAI	7191	357681,00	96000,00	453681,00
99	THEOVILUS TANDIALLO	8432	321357,00	96000,00	417357,00
100	SAHIBU	4190	602940,00	192000,00	794940,00
101	RAMLI ACHMAD	6722	562485	192000,00	754485,00
102	MANELSON PAKILA	6644	282508	64000,00	346508,00
103	SEMUEL	6923	485660,00	192000,00	677660,00
104	SUPARMAN	6874	485660,00	192000,00	677660,00
105	AMIRUDDIN R	6655	608388	192000,00	800388,00
106	JACOB PARANTEA N	761	456291	96000,00	552291,00
107	ALIMIN	6929	485660,00	192000,00	677660,00
108	MARTHEN PARINDING	7247	466404,00	192000,00	658404,00
109	MUHAJIR	7934	445400	192000,00	637400,00
110	ISRAWATY	8391	107119	32000,00	139119,00
111	HARDING	7277	466404,00	192000,00	658404,00
112	JONI MANDE	6939	460485	32000,000	780485,00
113	ISMAIL	7032	607075,00	32000,000	927075,00
114	ISRAM	7944	556750	32000,000	876750,00
115	BACO YUSUF	3846	760485	32000,000	1080485,00
116	SAPIA BURHANUD DIN	1283	937475	32000,000	1257475,00
117	MALIK MAMBELA	6450	607075,00	32000,000	927075,00
118	SAPRING	3363	760485	32000,000	1080485,00
119	MASHAR AMIN	8384	535595	32000,000	855595,00
120	IDRIS	3514	760485	32000,000	1080485,00
121	MATOANA SAMSIRMA RO	8436	535595	32000,000	855595,00
122	LUTHER TOBAN	1310	760485	32000,000	1080485,00
123	ADRYANUS MENTARUK	8404	535595	32000,000	855595,00
124	KAMRULLA H	7788	556750	32000,000	876750,00
125	BURHAN	6023	753675	32000,000	1073675,00



	TOSALILI				
126	HASRUDDIN	6926	596135	32000,000	916135,00
127	AGUS TAMRIN	6916	485660,00	192000,00	677660,00
128	DENI EDISON	6871	607075,00	32000,000	927075,00
129	YAHYA DAMSI	7778	445400	192000,00	637400,00
130	AGUSSALIM SAPARUDDIN	7888	540945	32000,000	860945,00
131	JOHANIS PALIK	968	608388	192000,00	800388,00
132	ARIS RANNI	1392	1949685	0	1949685,00
133	DANIEL YOHANIS	4397	1065360	32000,000	1385360,00
134	HARSYAD HARA	7796	556750	32000,000	876750,00
135	ABD KASIF	8435	535595	32000,000	855595,00
136	AMRULLAH	6680	423762	96000,00	519762,00
137	HERTASMIN MUCHLIS	7794	556750	32000,000	876750,00
138	ANDIKA	7783	540945	32000,000	860945,00
139	BADARUDDIN BAKRI	6716	608388	192000,00	800388,00
140	RUSMAN SANDU	6344	456291	96000,00	552291,00
141	ISMAN PAGITA	7854	459803	192000,00	651803,00
142	BERU	2939	608388	96000,00	704388,00
143	IRMAN	7777	556750	32000,000	876750,00
144	HERMAN	6946	304194	64000,00	368194,00
145	LAURENSIUS LABA	6616	608388	192000,00	800388,00
146	MUHAMMAD RUM	4369	152000,00	32000,00	184000,00
147	ASLAM ABDULLAH	7235	583005	32000,000	903005,00
148	SEPRIANUS RAMPAK	7903	556750	32000,000	876750,00
149	NURDIN MANDAGI	7201	485660,00	192000,00	677660,00
150	ABDUL WAHAB	7264	583005	32000,000	903005,00
151	AMAR MA'RUF	6665	690128	192000,00	882128,00
152	SAIDIMAN ABADI	6631	696600	192000,00	888600,00
153	SABANG	3277	608388	192000,00	800388,00
154	MUHAMMAD YUSUF	6936	452205	96000,00	548205,00
155	MASHUDDIN	6937	749980	192000,00	941980,00
156	JUMANZAH	8439	321357	96000,00	417357,00
157	IRFAN ILHAM	8447	535595	32000,000	855595,00
158	NASRULLAH	6662	608388	192000,00	800388,00
159	RISAL BANNE	7203	485660,00	192000,00	677660,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160	ALI SINAGA	7901	540945	32000,000	860945,00
161	HERMAN LIMBONG	6032	456291	96000,00	552291,00
162	SABARUDDIN	7358	466404,00	192000,00	658404,00
163	MIKHAEL BONI	8786	424392	192000,00	616392,00
164	ISMAIL	7448	476908	192000,00	668908,00
165	ABDUL DOHIR	7450	596135	32000,000	916135,00
166	HENRIK BANDASO	6666	753675	32000,000	1073675,00
167	ARIANTO	7884	535595	32000,000	855595,00
168	LAMBERTUS S S	6763	760485	32000,000	1080485,00
169	KRICKSON NATALIUS	7269	466404,00	192000,00	658404,00
170	AHMAD YANI	7270	583005	32000,000	903005,00
171	AJAT MUNAJAT	7243	466404,00	192000,00	658404,00
172	YUDI SUSANTO	7258	466404,00	192000,00	658404,00
173	AMIN	7196	485660,00	192000,00	677660,00
174	HENRIK GENGONG	7198	607075,00	32000,000	927075,00
175	DANIEL PASEDAN	6883	364245	96000,00	460245,00
176	DURLAN	8438	535595	32000,000	855595,00
177	PERI BATTU MASULI	6691	374990	64000,00	438990,00
178	SYAWAL	8413	535595	32000,000	855595,00
179	MELKI PAYEMBOAN	7790	445400	192000,00	637400,00
180	MUH YANRIS SAK	6704	706270	32000,000	1026270,00
181	ELIASHIK PARINDING	6156	1045665	32000,000	1365665,00
182	SIMALANG O JALISTEN	5921	627399	96000,00	723399,00
183	ALTONIS LAELOMA	6359	760485	32000,000	1080485,00
184	AGUSTINUS MANGALIK	6681	565016,00	192000,00	757016,00
185	YOHAN BABANGAN	7354	466404,00	192000,00	658404,00
186	WARIS DARWIS	7225	583005,00	32000,000	903005,00
187	TONI HERPLY	7938	556750,00	32000,000	876750,00
188	PAMILEAN JONITURU	7241	583005,00	32000,000	903005,00
189	IRWAN ALSAD	7246	583005,00	32000,000	903005,00
190	MUH IMRAN HASAN	7932	432756,00	192000,00	624756,00
191	PARGURUAN GULTOM	7833	445400,00	192000,00	637400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192	ALIMANG	7320	699606,00	192000,00	891606,00
193	ISBAIR	6970	760485,00	32000,000	1080485,00
194	YOHANIS MASSOLA	6679	706270,00	32000,000	1026270,00
195	MULYADI B	6714	753675,00	32000,000	1073675,00
196	SUPRIADI SABRI	6713	753675,00	32000,000	1073675,00
197	ISMAN MUSTAFA	7208	607075,00	32000,000	927075,00
198	HASRUDDIN GALU	7205	607075,00	32000,000	927075,00
199	CORNELIUS MESAK	2584	639216,00	96000,00	735216,00
200	WAHIR	6648	760485,00	192000,00	952485,00
201	YOHANIS MANDILA	1311	152097,00	32000,00	184097,00
202	MARTHEN MALI	350	639216,00	96000,00	735216,00
203	MISTON JALIL	6678	706270,00	32000,000	1026270,00
204	LUKAS	6985	706270,00	32000,000	1026270,00
205	ANTONIUS KONDO	7774	222700,00	64000,00	286700,00
206	ARUNG PANGGALU	7322	583005,00	32000,000	903005,00
207	YOSKRISMAN JAYA	7202	607075,00	32000,000	927075,00
208	ABD WAHAB	7904	556750,00	32000,000	876750,00
209	DARTIN LAENUS	6028	608388,00	192000,00	800388,00
210	YULIUS PARARAK	6366	749980,00	192000,00	941980,00
211	MUSKAMAR	7190	607075,00	32000,000	927075,00
212	HAMDAN BADARUDIN	6935	607075,00	32000,000	927075,00
213	HERSON PINTO	7831	556750,00	32000,000	876750,00
214	SAFIUDDIN	6969	760485,00	32000,000	1080485,00
215	ASEP NURTSEHA	7313	466404,00	192000,00	658404,00
216	ASDIR	5942	1065360,00	0	1065360,00
217	YAMAN PAYUNG	6977	5665016,00	192000,00	5857016,00
218	NURSAM ASYARIF	7261	540945,00	32000,000	860945,00
219	DAHAR	5944	426144,00	64000,00	490144,00
220	JONI MANGIWA PAMALLA	8787	318294,00	96000,00	414294,00
221	HAMZAH MUH ARSYAD	4305	760485,00	32000,000	1080485,00
222	SAHRUDDIN	7442	596135,00	32000,000	916135,00
223	LUKAS TIRAINTE	6473	760485,00	32000,000	1080485,00
224	TALIAN	6474	760485,00	32000,000	1080485,00
225	MUSTAMIN	7204	607075,00,00	32000,000	927075,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226	SAIFUL	6991	847524,00	32000,000	1167524,00
227	GERSON BOSA	7440	596135,00	32000,000	916135,00
228	MAKSIMUS WON	6692	456291,00	96000,00	552291,00
229	YUSUF SATTU	4368	456291,00	96000,00	552291,00
230	ANDARIAS PUKA	6452	456291,00	96000,00	552291,00
231	SUNARKO	5936	456291,00	96000,00	552291,00
232	SUDARMAN	8771	106098,00	32000,00	138098,00
233	PAULUS SAMPE KENDEK	4871	639216,00	96000,00	735216,00
234	AGUSTINUS SINA	8452	214238,00	64000,00	278238,00
235	ESRA ROMBE	8440	321357,00	96000,00	417357,00
236	TELLO BANGUN	6478	627399,00	96000,00	723399,00
237	SURIAMAN	7954	334050,00	96000,00	430050,00
238	SAMID	8417	321357,00	96000,00	417357,00
239	EDI	7925	540945,00	32000,000	860945,00
240	BENYAMIN	6651	760485,00	32000,000	1080485,00
241	ABDUL RAHMAN A.S	6338	608388,00	192000,00	800388,00
242	ALHAM ADAMU	8412	428476,00	192000,00	620476,00
243	YUSUF ROJA	4178	993150,00	32000,000	1313150,00
244	MAKMUR SUBUH	6336	760485,00	32000,000	1080485,00
245	SUHAIL SYAMSUDDIN	6690	753675,00	32000,000	1073675,00
246	SUKARDI	6919	607075,00,00	32000,000	927075,00
247	SEMUEL SENGA	8772	530490,00	32000,000	850490,00
248	RASIDIN	6027	608388,00	192000,00	800388,00
249	FRANS MARA	7262	445400,00	192000,00	637400,00
250	HAROKING PADEMA	7193	476908,00	192000,00	668908,00
251	SIMSON	6330	608388,00	192000,00	800388,00
252	MARYORI TANGKE RINGAN	4925	602940,00	32000,000	922940,00
253	RAPPE	4544	456291,00	96000,00	552291,00
254	RIDWAN KAMEDI	7791	445400,00	192000,00	637400,00
255	KASMIN	7836	334050,00	96000,00	430050,00
256	SAFARUDDIN	6632	836532,00	192000,00	1028532,00
257	ABDUL RAHMAN	7877	540945,00	32000,000	860945,00
258	ATMAL	6650	753675,00	32000,000	1073675,00
259	HAMSAH JUSARA	433	760485,00	32000,000	1080485,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260	JOHANIS LIMBONG	2377	608388,00	192000,00	800388,00
261	YOHANIS LAMBA	4995	844508,00	192000,00	1036508,00
262	MARKUS TODING KULA	7232	583005,00	32000,000	903005,00
263	ANCONG NEGARA	7893	556750,00	32000,000	876750,00
264	HAMZAH	4386	1065360,00	32000,000	1385360,00
265	PETRUS LUNDA	6033	760485,00	32000,000	1080485,00
266	ROBERTO DE'E	7255	583005,00	32000,000	903005,00
267	BERDY MANGGALA	7878	556750,00	32000,000	876750,00
268	RASLAM	7308	583005,00	32000,000	903005,00
269	IRAWAN KASIM	7781	556750,00	32000,000	876750,00
270	SUHERMAN	7782	540945,00	32000,000	860945,00
271	WAHAB HAMZAH	4419	1271532,00	0	1271532,00
272	MUSTAKIM	6041	1065360,00	32000,000	1385360,00
273	ACHMAD	7021	706270,00	32000,000	1026270,00
274	SUDARTON O	7206	364245,00	96000,00	460245,00
275	MASJUDDIN	6850	760485,00	32000,000	1080485,00
276	YULIUS TIMBANG	1184	1065360,00	32000,000	1385360,00
277	EGA RAHMAN	6296	937475,00	32000,000	1257475,00
278	HARSIL TJACO	2535	608388,00	192000,00	800388,00
279	CANDRA MURSIDA	6660	602940,00	192000,00	794940,00
280	ANNAS	6854	753675,00	32000,000	1073675,00
281	MAHAMUD DIN	7029	317821,00	64000,00	381821,00
282	HASAN PARAGAI	3566	456291,00	96000,00	552291,00
283	AMRI ABD FATAH	7257	349803,00	96000,00	445803,00
284	SYAHARUD DIN S	6298	695104,00	0	695104,00
285	SOMBA	2558	639216,00	96000,00	735216,00
286	SUGITO	1386	424694,00	0	424694,00
287	GIDEON	7446	357681,00	96000,00	453681,00
288	YEPTA AMBETA	6917	485660,00	192000,00	677660,00
289	MATIUS TIKU MASSERU	6618	456291,00	96000,00	552291,00
290	MUHAMMAD SAIFUL	7789	432756,00	192000,00	624756,00
291	RAMBUNG	7359	445400,00	192000,00	637400,00
292	AMIRUDDIN	6925	432756,00	192000,00	624756,00
293	DENDANG YOHANIS	5937	794520,00	192000,00	986520,00
294	ANTHON SYAM	7227	466404,00	192000,00	658404,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295	URSINUS LARONGGE	7318	466404,00	192000,00	658404,00
296	PAHRUDDIN	7475	476908,00	192000,00	668908,00
297	HERTOH ITEM	7273	349803,00	96000,00	445803,00
298	WAHYUDDIN B	6300	608388,00	0	608388,00
299	MENE' PAIPINAN TANDI	6695	152097,00	32000,00	184097,00
300	ANDARIAS SAMPE	6343	608388,00	192000,00	800388,00
301	RIFAI	7279	349803,00	96000,00	445803,00
302	JUSJENTO	7842	445400,00	192000,00	637400,00
303	RABANG TANDILINTING	2096	456291,00	96000,00	552291,00
304	HERMANTO	6741	423762,00	96000,00	519762,00
305	AKSAN	7940	334050,00	96000,00	430050,00
306	ILHAM SAPE	6973	456291,00	96000,00	552291,00
307	SUHARDIN	6331	608388,00	192000,00	800388,00
308	IMANUEL TAPPI	8403	428476,00	192000,00	620476,00
309	ALOYSIUS MARUT	6451	760485,00	32000,00	1080485,00
310	ABDUL KADIR	7937	411560,00	192000,00	603560,00
311	MUSAFIR	7316	346404,00	96000,00	442404,00
312	ABDUL RAHMAN	7989	411560,00	192000,00	603560,00
313	EDY PERA	7305	443560,00	192000,00	635560,00
314	IRFAN	7936	411560,00	192000,00	603560,00
315	YASMIN YUNUS	7991	514450,00	192000,00	706450,00
316	IRMAWAN	8433	321357,00	96000,00	417357,00
317	TAMKHOLID	6706	915595,00	32000,00	1235595,00
318	RIMPUNG TINGGA	353	456291,00	96000,00	552291,00
319	AGUSTINUS SIMAN	6677	565016,00	192000,00	757016,00
320	AWALUDDIN HATTA	7362	466404,00	192000,00	658404,00
321	ADY DILE	7192	485660,00	192000,00	677660,00
322	YUNUS LALLO	1192	639216,00	96000,00	735216,00
323	AMPANG TATO	7935	334050,00	96000,00	430050,00
324	JULI PALANGGU	2591	213072,00	32000,00	245072,00
325	JAMALUDDIN	6645	485660,00	192000,00	677660,00
326	RUKHIMAN	6663	304194,00	64000,00	368194,00
327	AMRULLAH	7785	334050,00	96000,00	430050,00
328	AMRAN BAKRI	7795	445400,00	192000,00	637400,00
329	PITER	6748	364245,00	96000,00	460245,00
330	YONATHAN	7310	466404,00	192000,00	658404,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BASSI				
331	USMAN SIABENG	6868	485660,00	192000,00	677660,00
332	HENDRICUS	7245	466404,00	192000,00	658404,00
333	DARDIRI	7253	349803,00	96000,00	445803,00
334	DAHLANG TODING	7775	445400,00	192000,00	637400,00
335	JALIL MINGSA	6303	852288,00	0	852288,00
336	ASRAL	7439	364245,00	96000,00	460245,00
337	MUHAMMA D JUFRI	6768	304194,00	64000,00	368194,00
338	YASMIN	6918	364245,00	96000,00	460245,00
339	HASMUJUR	7233	349803,00	96000,00	445803,00
340	SAMBARA SONDA	564	456291,00	96000,00	552291,00
341	HAMID	7902	334050,00	96000,00	430050,00
342	TIMBARA	6914	473796,00	192000,00	665796,00
343	LAURENSIU S NUWAR	6351	152097,00	32000,00	184097,00
344	ARMAN ZAAT	6611	456291,00	96000,00	552291,00
345	ANWAR SYAM	7930	411560,00	192000,00	603560,00
346	DAVID KANE' TEK	7933	308670,00	96000,00	404670,00
347	YULIUS LIDAN	7274	466404,00	192000,00	658404,00
348	HINDRA ABBAS	6922	607075,00,00	192000,00	799075,00
349	ASTRINI PUSPITA SARI BA	8390	535595,00	192000,00	727595,00
350	HERIK	7350	466404,00	192000,00	658404,00
351	ALAMSYAH	6672	565016,00,00	192000,00	757016,00
352	MATHIAS LAPPUNG	6976	282508,00	64000,00	346508,00
353	DANIEL DJIWANG	7887	445400,00	192000,00	637400,00
354	YUSAK SALI	6866	485660,00	192000,00	677660,00
355	ANDARIAS PALAYUKAN	7900	222700,00	64000,00	286700,00
356	HASRUL	7851	216378,00	64000,00	280378,00
357	BANE REDY	5930	608388,00	192000,00	800388,00
358	DARWIN	8406	321357,00	96000,00	417357,00
359	SAHBIN B	6978	565016,00,00	192000,00	757016,00
360	RANI TANDI	7319	349803,00	64000,00	413803,00
361	ALBERTUS MANTA	7928	432756,00	192000,00	624756,00
362	YUSRAN HERMAN	7239	466404,00	192000,00	658404,00
363	KAHARUDDIN	6930	485660,00	192000,00	677660,00
364	ISHAK TANGKE SARAMBUN	6669	565016,00,00	192000,00	757016,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365	SAHABUDDI N	7265	466404,00	192000,00	658404,00
366	KAMARUDDIN	8428	321357,00	96000,00	417357,00
367	ZULKIFLI	8422	214238,00	64000,00	278238,00
368	YULIANUS BARA	7949	432756,00	192000,00	624756,00
369	RONALDUS SEMPA	8423	107119,00	32000,00	139119,00
370	HENRIK SAMPEDAU N	6657	456291,00	96000,00	552291,00
371	ASWAN PARAGAI	8419	428476,00	192000,00	620476,00
372	TOPING TANGKELA YUK	6764	456291,00	96000,00	552291,00
373	BUNTU ARLIUS	5943	426144,00	64000,00	490144,00
374	JOHAN PAIDJO	6345	608388,00	192000,00	800388,00
375	ARPIN PARENREN G	6044	304194,00	64000,00	368194,00
376	SYAM ARWAN DARMAWA N	7240	466404,00,00	192000,00	658404,00
377	SUPRIADI	7833	445400,00	192000,00	637400,00
378	DARWIS	7883	445400,00	192000,00	637400,00
379	NURSAPPAL E	8421	321357,00	96000,00	417357,00
380	OBET BANNE TONDOK	7951	445400,00	192000,00	637400,00
381	YULIUS MANGERA	7207	364245,00	96000,00	460245,00
382	PHILIPUS ELLE	4920	456291,00	96000,00	552291,00
383	MOTAKA MUSTAMAL	188	426144,00	64000,00	490144,00
384	ISMIKA	8446	428476,00	96000,00	524476,00
385	ISRAN	7186	476908,00	192000,00	668908,00
386	TACHRIN	6445	608388,00	192000,00	800388,00
387	JISTAMAR	7443	485660,00	192000,00	677660,00
388	RIDWAN ABDULLAH	7306	349803,00	96000,00	445803,00
389	PETRUS PAEMBONA N	6620	608388,00	192000,00	800388,00
390	YUSTER	4867	456291,00	96000,00	552291,00
391	FACHRI KASO	7881	445400,00	192000,00	637400,00
392	SONDA SALIM	6157	452205,00	96000,00	548205,00
393	ABD HARIS	7849	540945,00	192000,00	732945,00
394	TAUFIK HUSAIN	7776	432756,00	192000,00	624756,00
395	PATANDUK LOSONG	5929	852288,00	192000,00	1044288,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396	HASRIL	7948	334050,00	96000,00	430050,00
397	MARKUS BUKE	6942	608388,00	192000,00	800388,00
398	AGUSTINUS PONG ANDI	6921	466404,00	192000,00	658404,00
399	FAISAL TOSALILI	6638	549357,00	96000,00	645357,00
400	BATIL	4997	562485,00	96000,00	658485,00
401	AGUSTINUS LAMBE PATAY	7260	466404,00	192000,00	658404,00
402	MAMAN YULIANTO	8386	428476,00	192000,00	620476,00
403	NASRUL	6708	565016,00,00	192000,00	757016,00
404	KASMAL WAHID	7950	445400,00	192000,00	637400,00
405	HEZRON	8408	321357,00	96000,00	417357,00
406	BERDI EDISON	7846	445400,00	192000,00	637400,00
407	NORMAN HUTAPEA	4395	456291,00	96000,00	552291,00
408	ARIS MARANGA	6353	602940,00	192000,00	794940,00
409	PITHER RURUK PALEMBAN	6335	304194,00	64000,00	368194,00
410	RUSLI ZAMIK	3703	426144,00	64000,00	490144,00
411	RAHMAT	6696	760485,00	32000,000	1080485,00
412	HAKIM	5924	760485,00	32000,000	1080485,00
413	HASIRUDDI N	8410	321357,00	96000,00	417357,00
414	SANGKOLI	6369	602940,00	192000,00	794940,00
415	WAHID ANDI KIRWAN	6290	456291,00	96000,00	552291,00
416	LUBIS MAKBUL	7192	485660,00	192000,00	677660,00
417	BANDASO LUKAS	6291	426144,00	0	426144,00
418	SONDA SEMUEL	6292	685288,00	0	685288,00
419	YOSEPH DULY	6446	456291,00	96000,00	552291,00
420	ARKYPUS PALOBO	7187	364245,00	96000,00	460245,00
421	TANI LUTHER	5948	602940,00	192000,00	794940,00
422	HILARIUS SAHARI	6612	456291,00	96000,00	552291,00
423	AKMAL	6940	456291,00	96000,00	552291,00
424	MIFTAHUD DIN YAHYA	7880	612424,00	192000,00	804424,00
425	RUSTAM M PONDU	6848	152097,00	32000,00	184097,00
426	SENGA	3086	904410,00	32000,000	1224410,00
427	MAISAL RIZAL	3706	760485,00	32000,000	1080485,00
428	BURHANUD DIN	8593	152097,00	32000,00	184097,00



JUMLAH	236754705,00	86752000,00	323506705,00
--------	--------------	-------------	--------------

DEPARTEMEN PLANT MAINT

No	Nama	BN	No Pay For Sift Code (Rp)	No Pay (Rp)	Total (Rp)	
1	RANTE RERUNG	7677	461872,00	192000,00	653872,00	
2	TIDAL	4980	522450,00	96000,00	618450,00	
3	BASO ANWAR	6265	522450,00	96000,00	618450,00	
4	MUHAMMAD ARIF	5591	795560,00	192000,00	987560,00	
5	FATHAN ALFATAH	7542	508672,00	192000,00	700672,00	
6	MATHIUS TODING	5150	522450,00	96000,00	618450,00	
7	ARTOTINUS LIMBU	7602	504048,00	192000,00	696048,00	
8	SYACHRENG	4970	522450,00	96000,00	618450,00	
9	ALEXANDER ARIANTO BAKK	7535	378036,00	96000,00	474036,00	
10	AHSAN	6263	289294,00	64000,00	353294,00	
11	RAHIM MARES	3598	690128,00	192000,00	882128,00	
12	YOHANIS BANNE	5144	696600,00	192000,00	888600,00	
13	BOAS GALLARAN	5802	696600,00	192000,00	888600,00	
14	HASBI BIDOL	7623	252024,00	64000,00	316024,00	
15	DAUD KARAENG	3881	696600,00	192000,00	888600,00	
16	DAMIR		6271	174150,00	32000,00	206150,00
17	ANSAR		4926	795560,00	192000,00	987560,00
18	LUKAS MENTARUK		7591	252024,00	64000,00	316024,00
19	SANGKALA		7679	115468,00	32000,00	147468,00
20	NDAKU ALWI		5989	795560,00	192000,00	987560,00
21	CHARLLES		7072	578588,00	192000,00	770588,00
22	KASWAN		3593	810544,00	192000,00	1002544,00
23	MUSRITA TOSALILI		6260	814917,00	0	814917,00
24	KAMARUDDIN AMBON		3988	690128,00	192000,00	882128,00
25	MELDY HEYN MASO		7622	504048,00	192000,00	696048,00
26	BERNADUS BENY		7688	504048,00	192000,00	696048,00
27	RAHAYU ARHAM		8861	201804,00	64000,00	265804,00
28	PARSAULIAN SILITONGA		7625	504048,00	192000,00	696048,00
29	DJAMALUDDIN		7073	555284,00	192000,00	747284,00
30	ALPIUS PALU		6262	578588,00	192000,00	770588,00
31	AGUS ISPARMONO		5489	696600,00	192000,00	888600,00
32	SYAFIUDDIN THIOS		7585	252024,00	64000,00	316024,00
33	MUHAMMAD HIDAYAT		7624	504048,00	192000,00	696048,00
34	KASIM KAMISENG		3892	578588,00	192000,00	770588,00
35	MUHAMMAD SAIDE		4274	732476,00	192000,00	924476,00
36	ASEP TARWANTO		5984	696600,00	192000,00	888600,00
37	DEVI DUMA		6793	517596,00	96000,00	613596,00
38	FADLY		7599	378036,00	96000,00	474036,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	SUGIYANTO	7626	504048,00	192000,00	696048,00
40	SARMIN LALLANG	6791	517596,00	96000,00	613596,00
41	JASKIN	6251	696600,00	192000,00	888600,00
42	PAULUS TARUK	7534	378036,00	96000,00	474036,00
43	WILLEM	6274	348300,00	64000,00	412300,00
44	TITUS SENGA	7537	504048,00	192000,00	696048,00
45	PITER BALLE RANTELIL	6574	696600,00	192000,00	888600,00
46	HAMSUL	7536	504048,00	192000,00	696048,00
47	NAIS DOLA	6786	690128,00	192000,00	882128,00
48	HAKIM	7597	369987,00	96000,00	465987,00
49	ARWAN ROMBEKILA	7601	369987,00	96000,00	465987,00
50	SUMANTO	6264	696600,00	192000,00	888600,00
51	ARLING	5991	696600,00	192000,00	888600,00
52	DENY PONGSAPAN	7600	504048,00	192000,00	696048,00
53	ASTAMAL	7061	795560,00	192000,00	987560,00
54	UMAR PATURUNI	1398	1698776,00		1698776,00
55	JASIATAN	4289	732476,00	192000,00	924476,00
56	JUFRI SELLE	5145	522450,00	96000,00	618450,00
57	MATHIUS SATTU	6278	517596,00	96000,00	613596,00
58	MARSADIN	6280	696600,00	192000,00	888600,00
59	ARJONI	7069	1088502,00	32000,000	1408502,00
60	RIZAL	7586	662505,00	32000,000	982505,00
61	RACHMAD	7587	504048,00	192000,00	696048,00
62	HIRWAN SYAH	7594	504048,00	192000,00	696048,00
63	HENDRA	7595	265002,00	64000,00	329002,00
64	MUKMIN	5988	690128,00	192000,00	882128,00
65	LAHASANG	7592	397503,00	96000,00	493503,00
66	BADRI	6275	544251,00	96000,00	640251,00
67	MASHURI	6282	696600,00	192000,00	888600,00
68	ARDI KASIM	7545	504048,00	192000,00	696048,00
69	JAHIRUDDIN TOSALILI	6249	696600,00	192000,00	888600,00
70	YOHAN UPI	7543	378036,00	96000,00	474036,00
71	ERWANDY	7538	504048,00	192000,00	696048,00
72	UNANG YUHENDAR	6285	708624,00		708624,00
73	HAERUDDIN	485	696600,00	192000,00	888600,00
74	MUSLIMIN KAMIDI	747	578588,00	192000,00	770588,00
75	HASAB HAKIM	7596	53000,004,00	192000,00	722004,00
76	AISYATU RACHMAN	6858	362834,00	64000,00	426834,00
77	PAULUS GALLA	6787	725668,00	192000,00	917668,00
78	JACOBUS TANGA	3151	549357,00	96000,00	645357,00
79	PATRIANUS SALINDING	4556	1080804,00		1080804,00
80	AMIRUDDIN	7068	725668,00	192000,00	917668,00
81	ASWAR	6830	836532,00	192000,00	1028532,00
82	MUSLIMIN	6790	725668,00	192000,00	917668,00
83	ADE SATRIYADI	6269	915595,00	32000,000	1235595,00
84	DANIEL TANDILOLO	6857	907085,00	32000,000	1227085,00
85	PIPIN SURYANA	7604	662505,00	32000,000	982505,00
86	TAUFIK	6831	836532,00	192000,00	1028532,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87		KASMAN AZIS	6796	725668,00	192000,00	917668,00
88		ABUBAKAR BEDDU	5152	1441072,00	0	1441072,00
89		MUALIM	7062	627399,00	96000,00	723399,00
90		DARSONO	5804	915595,00	32000,000	1235595,00
91		JASMAN	8489	302706,00	96000,00	398706,00
92		NAHARDIN	8467	443560,00	192000,00	635560,00
93		ARPIAN	7692	461872,00	192000,00	653872,00
94		SAMUEL RENDENG	7721	346404,00	96000,00	442404,00
95		FAISAL AM	7067	907085,00	32000,000	1227085,00
96		ISHAK MALAHA	7593	662505,00	32000,000	982505,00
97		HAERULLAH	6806	608388,00	192000,00	800388,00
98		JASMAN	6859	907085,00	32000,000	1227085,00
99		AGUS RIYANTO	6785	907085,00	32000,000	1227085,00
100		MUHAMMAD RIZAL	6789	544251,00	96000,00	640251,00
101		NAPI YUSUF	6860	544251,00	96000,00	640251,00
102		M. YUSUF	7071	544251,00	96000,00	640251,00
103		AGUSTIAN WIBOWO	7603	397503,00	96000,00	493503,00
104		SUGIANTO	6788	907085,00	32000,000	1227085,00
105		DECKY PANGEMANAN	6259	522450,00	96000,00	618450,00
106		MASNUR	6276	544251,00	96000,00	640251,00
107		A. KISMAN	6279	725668,00	192000,00	917668,00
108		NARDA	6370	2115624,00	0	2115624,00
JUMLAH			67109186,00		17152000,00	84261186,00

DEPARTEMEN PROSES PLANT

No	Nama	BN	No Pay For Sift Code (Rp)	No Pay (Rp)	Total (Rp)
1	JUDIHAL	6063	578823,00	96000,00	674823,00
2	ARLIN	7124	771764,00	192000,00	963764,00
3	AMIRUDDIN	7063	732476,00	192000,00	924476,00
4	SUARDI	5659	771764,00	192000,00	963764,00
5	BALAHANTI SUPARMAN	8086	749980,00	192000,00	941980,00
6	DIRHAM MUIS	7111	753675,00	32000,000	1073675,00
7	HERMAN EDI BANDASO	7413	592245,00	32000,000	912245,00
8	HENDRIK PATASIK	7405	592245,00	32000,000	912245,00
9	DARIUS SANDABUN GA	353	937475,00	32000,000	1257475,00
10	YASMIN PANTILEN	6064	964705,00	32000,000	1284705,00
11	MOER MUSLIMIN	6062	964705,00	32000,000	1284705,00
12	YOSEF TEPU	1209	964705,00	32000,000	1284705,00
13	DEDY	7406	587625,00	32000,000	907625,00
14	JOJOR SITOMPUL	2948	964705,00	32000,000	1284705,00
15	SAPRI	6055	964705,00	32000,000	1284705,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ABDUL RAHMAN				
16	LABAN	6123	771764,00	192000,00	963764,00
17	MURIYADI	1056	771764,00	192000,00	963764,00
18	SAIFULLAH AM	7132	562485,00	96000,00	658485,00
19	SOMBOLAY UK	5545	562485,00	96000,00	658485,00
20	MOH ANIS GEGE	2208	771764,00	192000,00	963764,00
21	MALAGO TARMAN	5651	578823,00	96000,00	674823,00
22	ANWAR	6060	771764,00	192000,00	963764,00
23	PAULUS KONDORAP A	6885	485660,00	192000,00	677660,00
24	M YUSRAN	853	385882,00	64000,00	449882,00
25	AMANG	6882	485660,00	192000,00	677660,00
26	RASWAN RASYID	7114	608388,00	192000,00	800388,00
27	NOVER MENSUA	7122	608388,00	192000,00	800388,00
28	MUKDAR	6051	771764,00	192000,00	963764,00
29	KAMPAE	4945	749980,00	192000,00	941980,00
30	HAERUDDIN AMRIN	7412	450588,00	192000,00	642588,00
31	DAHRIN	6130	713248,00	192000,00	905248,00
32	MASSELENG YUNUS	5645	733964,00	192000,00	925964,00
33	AHMAD SAHARUDDIN	5650	749980,00	192000,00	941980,00
34	YOHANIS BASSI	6107	771764,00	192000,00	963764,00
35	MARHALIS	5999	771764,00	192000,00	963764,00
36	JUMADI TAKDIR	7139	608388,00	192000,00	800388,00
37	MAHADANA	6327	725668,00	192000,00	917668,00
38	DALVI SONGGO	7414	473796,00	192000,00	665796,00
39	YESAYA	7145	608388,00	192000,00	800388,00
40	YULIUS BARAK PADANG	7416	473796,00	192000,00	665796,00
41	AMBO UPE	3582	608388,00	192000,00	800388,00
42	HENDRA	7419	473796,00	192000,00	665796,00
43	LUKAS DUMA	4353	749980,00	192000,00	941980,00
44	YAMA DAMIR	6119	771764,00	192000,00	963764,00
45	HAERUDDIN TOMONI	1068	686960,00	192000,00	878960,00
46	RUDY DERENG	6052	771764,00	192000,00	963764,00
47	TADDA ABD HARI	6121	578823,00	96000,00	674823,00
48	IRWAN	7415	355347,00	96000,00	451347,00
49	YOKIMAN SAMOSIR	2902	212763,00	32000,00	244763,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	DAHLAN	6406	771764,00	192000,00	963764,00
51	DARSONO	8047	471024,00	96000,00	567024,00
52	RIDWAN	4357	771764,00	192000,00	963764,00
53	JUNJAR M	6133	771764,00	192000,00	963764,00
54	SUYADI	4695	771764,00	192000,00	963764,00
55	ADI SAMPE NURTOLU	6111	1385800,00	0	1385800,00
56	SOMBA PALINOAN	2254	771764,00	192000,00	963764,00
57	ACHMAD SEHU	639	771764,00	192000,00	963764,00
58	RAMLI	8046	628032,00	192000,00	820032,00
59	NURDIN	5003	937475,00	32000,000,00	1257475,00
60	MATANANG MASNUL	5657	749980,00	192000,00	941980,00
61	ATENG SALEMPA	3450	937475,00	32000,000,00	1257475,00
62	ALIMUDDIN BADDO	3915	937475,00	32000,000,00	1257475,00
63	SATAR YUSRAN	7112	937475,00	32000,000,00	1257475,00
64	LIUS BATUI	4588	749980,00	192000,00	941980,00
65	MOCH RAMLI	6113	771764,00	192000,00	963764,00
66	AMRIN SALMIN	5656	733964,00	192000,00	925964,00
67	ANDARIAS	4506	771764,00	192000,00	963764,00
68	NURSYAM	7064	696600,00	192000,00	888600,00
69	YUSUF LAGA EMBONG BULA	6059	749980,00	192000,00	941980,00
70	SIMON TARUK	4775	937475,00	32000,000,00	1257475,00
71	BADRI	8238	507444,00	192000,00	699444,00
72	TAHWIL	4989	1695376,00	0	1695376,00
73	RICHARD MITO	6117	964705,00	32000,000,00	1284705,00
74	GERSON GALENTA	6102	771764,00	192000,00	963764,00
75	PAYUNG ALLO	6431	964705,00	32000,000,00	1284705,00
76	TASMIN	7121	562485,00	96000,00,00	658485,00
77	ELI PAYUNG	6084	771764,00	192000,00,00	963764,00
78	HARPIN LASOK	4943	964705,00	32000,000,00	1284705,00
79	JAFAR ANDI	4862	964705,00	32000,000,00	1284705,00
80	MANSYUR ABD MANAF	6072	964705,00	32000,000,00	1284705,00
81	DJAMILUDD IN	6067	964705,00	32000,000,00	1284705,00
82	JUNAIDI	6137	937475,00	32000,000,00	1257475,00
83	DARWIS ROWI	6068	964705,00	32000,000,00	1284705,00
84	ANDI BAHRUN	8277	253722,00	0	253722,00
85	M HALIS MAHASENG	2715	1695376,00	0	1695376,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	DANIEL SAPAN	4408	771764,00	192000,00	963764,00
87	BANNA PAULUS	5546	964705,00	32000,000,00	1284705,00
88	MARENDA DAUD	5646	771764,00	192000,00	963764,00
89	EDI SANTOSO	6108	964705,00	32000,000	1284705,00
90	MUSALANG I	6120	771764,00	192000,00	963764,00
91	NASIR	6129	771764,00	192000,00	963764,00
92	TUNREN BAHARUDDIN	1292	964705,00	32000,000	1284705,00
93	YOHANIS PABENDANAN	6413	578823,00	96000,00	674823,00
94	JEJE AHMAD	5547	578823,00	96000,00	674823,00
95	YANCE KABA	6057	771764,00	192000,00	963764,00
96	UTTU AMIRUDDIN	6088	385882,00	64000,00	449882,00
97	MUHLIS	7109	456291,00	96000,00	552291,00
98	ADI JUWARSA	7420	473796,00	192000,00	665796,00
99	CHARLES CHRISTIAN	7136	760485,00	32000,000,00	1080485,00
100	HASDAR	7108	725668,00	192000,00	917668,00
101	YOHANIS SANNANG	7407	473796,00	192000,00	665796,00
102	NIRWANTO SULE	6881	607075,00	32000,000,00	927075,00
103	DESMARDIN	6151	964705,00	32000,000	1284705,00
104	RONI BARA PADANG	7409	473796,00	192000,00	665796,00
105	AGUS TOSALILI	4828	964705,00	32000,000,00	1284705,00
106	EMBAN PAKULLA	7144	760485,00	32000,000,00	0
107	ACHMAD DITU	204	725668,00	192000,00	917668,00
108	ASTAMAL	7105	760485,00	32000,000,00	1080485,00
109	JUFRI NATSIR	7411	592245,00	32000,000,00	912245,00
JUMLAH		81079948,00	22912000,00	103991948,00	

DEPARTEMEN PROSTECH

No	Nama	BN	No Pay For Sift Code (Rp)	No Pay (Rp)	Total (Rp)
1	BAKRI	3093	852288,00	192000,00	1044288,00
2	FADLY GANING SANSAIL	8268	476908,00	192000,00	668908,00
3	HERLINA AS	8506	233202,00	64000,00	297202,00
4	ALBAR SL	6422	749980,00	192000,00	941980,00
5	SAMSIR	7708	242830,00	64000,00	306830,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	ALBERT PALINGGI	3060	213072,00	32000,00	245072,00
7	RAMADHAN TABBA	8499	349803,00	96000,00	445803,00
8	ASTANY	8504	349803,00	96000,00	445803,00
9	R MUSLIMN	6241	578823,00	96000,00	674823,00
10	SUFYANTO	8258	473796,00	192000,00	665796,00
11	SLAMET	4788	732476,00	192000,00	924476,00
12	HENDRASU SANTO	8266	476908,00	192000,00	668908,00
13	SALDI	7709	628032,00	192000,00	820032,00
14	SAPARUDDIN	7047	749980,00	192000,00	941980,00
15	TURYONO PONCOHARDJONO	5080	732476,00	192000,00	924476,00
16	MARWIN	8272	476908,00	192000,00	668908,00
17	I NYOMAN CIRYA	8069	597268,00	192000,00	789268,00
18	IMRAN	8070	597268,00	192000,00	789268,00
19	SIMON DUMA	742	810544,00	192000,00	1002544,00
20	ZANAL ABIDIN	2872	810544,00	192000,00	1002544,00
21	MULYADI	5483	810544,00	192000,00	1002544,00
22	DANIEL GALE	6420	733964,00	192000,00	925964,00
23	ALFREDS MELALO	6415	550473,00	96000,00	646473,00
24	BINSARDO PARDEDE	7143	733964,00	192000,00	925964,00
25	SAKIR MUHTAR	7093	345064,00	64000,00	409064,00
26	AWALUDDIN	6409	385882,00	64000,00	449882,00
27	YACOB SAMPE	4787	771764,00	192000,00	963764,00
28	JUMARIS	8098	485660,00	192000,00	677660,00
29	ERIK PANATE	7131	578823,00	96000,00	674823,00
30	MUH GUSMAN ISMAIL	8498	233202,00	64000,00	297202,00
31	YUAN SAPUTRA GANNA	8257	473796,00	192000,00	665796,00
32	MANSYUR	7973	364245,00	96000,00	460245,00
33	MUH ERWIN NUR	8260	473796,00	192000,00	665796,00
34	AFFANDHI	8270	453548,00	192000,00	645548,00
35	ISHAQ	8500	583005,00	32000,00	903005,00
36	NURSAN LAMBU	2506	915595,00	32000,00	1235595,00
37	IBRAHIM AZIS	8672	233202,00	64000,00	297202,00
38	DIDIN SATRYANTO	8496	583005,00	32000,00	903005,00
39	MINGGU	791	915595,00	32000,00	1235595,00
40	IRMAWATI	8256	592245,00	32000,00	912245,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	DAVID PAIBA	7522	607075,00	32000,000	927075,00
42	IRWAN MANDA TIKUPADAN	8083	607075,00	32000,000	927075,00
43	IMRAN	7734	364245,00	96000,00	460245,00
44	AKHMAD YANI	8265	476908,00	192000,00	668908,00
45	SULE SIMON	2511	1065360,00	32000,000	1385360,00
46	THOMAS SALEDA	3040	771764,00	192000,00	963764,00
47	YUSUF TAPPI	4790	915595,00	32000,000	1235595,00
48	MARTHEN KENDEK	6419	964705,00	32000,000	1284705,00
49	ABD GANI PALANRO	1178	852288,00	192000,00	1044288,00
50	ISMIN SURDI	8284	592245,00	32000,000	912245,00
51	BUDI JACHRI	2469	852288,00	192000,00	1044288,00
52	KURNIAWA TY BASRI	8495	853005,00	32000,000	1173005,00
53	DARLIANTI	8497	466404,00	192000,00	658404,00
JUMLAH			31739238,00	10112000,00	41851238,00

DEPARTEMEN UTILITIES

No	Nama	BN	No Pay For Sift Code (Rp)	Sick Leave (Rp)	Total (Rp)
1	WASIR	7647	482588,00	192000,00	674588,00
2	RIO THALIB	7607	482588,00	192000,00	674588,00
3	FAHRI TOSALILI	7531	482588,00	192000,00	674588,00
4	RAJAB	6253	849388,00	0	849388,00
5	ZAINUDDIN LINTING	4249	596670,00	96000,00	692670,00
6	RAIS BANDASO	7340	537340,00	192000,00	729340,00
7	HAYDIR EGA SAPOETRA	7648	361941,00	96000,00	457941,00
8	ANHAR	8335	317685,00	96000,00	413685,00
9	BENYAMIN SAMPETODI NG	8289	332670,00	96000,00	428670,00
10	NASRANI PATASIK	8368	211790,00	64000,00	275790,00
11	MURSALIM	7527	241294,00	64000,00	305294,00
12	SUDIR	7338	403005,00	96000,00	499005,00
13	SAMSUBAH RI	6728	298634,00	64000,00	362634,00
14	EDI TATO	7690	403005,00	96000,00	499005,00
15	DARWAN SAWEDI	6760	529941,00	96000,00	625941,00
16	MISRA	5257	1274082,00	0	1274082,00
17	DARMO	6759	713248,00	192000,00	905248,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MASRUDDI N				
18	MUHAMMA D AMIN	6547	381504,00	96000,00	477504,00
JUMLAH			8899961,00	192000,000,00	10819961,00

MINE DEPARTMENT

No	Nama	BN	No Pay For Sift Code (Rp)	No Pay (Rp)	Total (Rp)
1	MUHADJIRI N ARDABIAN	6602	301470,00	64000,00	365470,00
2	MURSALIN AMIN HAMARUN	6469	785040,00	32000,000	1105040,00
3	MUSRIL	6893	578588,00	192000,00	770588,00
4	REY SAPUTRA	7096	378036,00	96000,00	474036,00
5	AFGHANI	7438	259360,00	64000,00	323360,00
6	BARTOLOM EUS ALLO	7104	493316,00	192000,00	685316,00
7	LUBIS ASHAR	7100	397503,00	96000,00	493503,00
8	ARDIN	946	696600,00	192000,00	888600,00
9	SYACHRIL	6753	597268,00	192000,00	789268,00
10	THOMAS DATU	7026	252024,00	64000,00	316024,00
11	STIVAN BENNY MAMA HIT	7095	298634,00	64000,00	362634,00
12	BAGIAWAN	7001	378036,00	96000,00	474036,00
13	ENOS TANGKEAL LO	7459	252024,00	64000,00	316024,00
14	ALPHI AMRI M	7427	597268,00	192000,00	789268,00
15	SIMON PONGRASSI	7027	378036,00	96000,00	474036,00
16	SEMUEL BANCONG	7000,00	378036,00	96000,00	474036,00
17	SETYA BUDI UTOMO	7099	597268,00	192000,00	789268,00
18	JUHARDI	6754	690128,00	192000,00	882128,00
19	YUGUSTIN POSI	6902	578588,00	192000,00	770588,00
20	ASDAR SAID	6767	597268,00	192000,00	789268,00
21	ANDARIAS MENTARUK	4320	885780,00	0	885780,00
22	MARTHEN LIMBONG ALLO	25556	708624,00	0	708624,00
23	BURHAN MPI LA	4303	885780,00	0	885780,00
24	AMUR	7028	397503,00	96000,00	493503,00
25	MALAGO	7886	407492,00	192000,00	599492,00
26	SABIR	6891	397503,00	96000,00	493503,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	13167173,00	3232000,00	16399173,00
--------	-------------	------------	-------------

PENGURUS SP KEP UK INCO SOROAKO

No	Nama	BN	No Pay For Sift Code (Rp)	Sick Leave (Rp)	Total (Rp)
1	ABDUL MALIK	7289	1388580,00	0	1388580,00
2	MUHAMMA D ALI	7574	361941,00	96000,00	457941,00
3	HAERUDDIN HASAN	4808	696600,00	192000,00	888600,00
4	SINDIR	7864	466404,00	192000,00	658404,00
5	PULUNGAN SUSANNA	6161	690128,00	192000,00	882128,00
6	BASO MURDIN	7762	749980,00	192000,00	941980,00
7	MUHAMMA D JAFAR	5622	522450,00	96000,00	618450,00
8	LUKMAN	5962	696600,00	192000,00	888600,00
9	JAHYADIN	6277	696600,00	192000,00	888600,00
10	TAPPI JHONI	5864	1146672,00	0	1146672,00
11	FAHMI GANING SANSAIL	8283	337941,00	96000,00	433941,00
12	CHRISCAL F SONY	6418	964705,00	32000,000	1284705,00
13	DAVIDSON TUNGKA	7977	201804,00	64000,00	265804,00
14	PENDY WAHYU	5137	1698776,00	0	1698776,00
15	WAHYU KRISTIANTO	6225	537340,00	192000,00	729340,00
16	RUSBIADI RUSTAM	6227	69000,000,00	192000,00	882000,00
17	KARMAN	5997	1388580,00	0	1388580,00
Total			13235101,00	2208000,00	15443101,00

TOTAL KESELURUHAN

No	Departemen	Anggota Kelompok (Orang)	Jumlah
1	Balantang/Malili	33	24392544
2	Central MTCE	58	31229213
3	Engineering	19	13847107
4	Fabrication	50	30318433
5	Logistics	39	28687586
6	Mem Gunung Batu	10	6027553
7	Mem-Plant Site	104	71262571
8	Mine Gunung Batu	3	2952600
9	Mine Harapan	428	323506705
10	Plant Maint	108	84261186
11	Proses Plant	109	103991948
12	Prostech	53	41851238
13	Utilities	18	10819961
14	Mine Departmen	26	16399173



15	Pengurus SP KEP UK Inco Soroako	17	15443101
Total		1075	804990919

Terbilang : 1.075 (Seribu Tujuh Puluh Lima) orang ;

Rp 804.990.919,00 (delapan ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas Rupiah) ;

13 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian berupa kehilangan upah/gaji yang seharusnya diperoleh para dan Kelompoknya pada bulan gaji November 2007, dengan nilai total keseluruhannya sebesar Rp 804.990.919,00 (delapan ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas Rupiah) ;

14 Bahwa adapun kerugian-kerugian para Penggugat dan Kelompoknya yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dihitung sejak tidak dibayarnya upah, dapat para Penggugat memberikan rincian sebagai berikut :

- a Kerugian Materiil, yakni kerugian berupa upah yang tidak dibayarkan pada bulan gaji November 2007 yang hingga saat diajukannya gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial ini berjumlah total Rp 804.990.919,00 (delapan ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas Rupiah) ;
- b Kerugian Imateriil, bahwa para Penggugat dan Kelompoknya merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang nilainya patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)

15 Bahwa dalam rangka untuk menjamin terdistribusinya ganti rugi dan dengan berpedoman pada Pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka dipandang perlu untuk membentuk komisi pembayaran ganti rugi yang selanjutnya disebut Komisi yang anggotanya terdiri dari :

- 1 (satu) orang yang mewakili para Penggugat sebagai anggota komisi ;
- 1 (satu) orang dari Tergugat sebagai anggota komisi ;
- 1 (satu) orang dari Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar yang khusus ditunjuk untuk itu sebagai anggota komisi merangkap ketua komisi ;

Adapun mekanisme/cara pembayaran ganti rugi selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Komisi ;



16 Bahwa para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) setiap harinya kepada para Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini ;

17 Bahwa para Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawabnya membayar semua hak-hak para Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan para Penggugat, dengan ini para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (coservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat berupa :

- a 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova E Silver No. Pol. DD 1164 RA ;
- b 1 (satu) unit Toyota Kijang LSX Hijau No. Pol. DD 671 RA ;
- c 1 (satu) unit Toyota Land Cruiser Putih No. Pol DD 409 RX ;
- d 1 (satu) unit Toyota Prado GX Silver No. Pol. DD 970 OS ;
- e 1 (satu) unit Volvo B7F 3563 Putih-Biru No. Pol DD 7210 RX ;
- f 1 (satu) unit Volvo B7F 3557 Putih-Biru No. Pol DD 7212 RX ;
- g 1 (satu) unit Volvo B7R 3569 No. Pol DD 7208 RX.

18 Bahwa oleh karena itu, gugatan ini berpedoman pada Pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum (kasasi) ;

19 Bahwa oleh karena itu pula, sangat patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

C PETITUM :

DALAM PROVISI :

- 1 Menetapkan dan menyatakan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) yang diajukan oleh para Penggugat adalah sah ;
- 2 Menyatakan bahwa para Penggugat dapat diterima dan dinyatakan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri-diri sendiri dan sekaligus untuk dan atas nama Kelompok ;



- 3 Memerintahkan kepada Anggota/Anggota-anggota Kelompok yang tidak menyetujui gugatan ini agar mengajukan Surat Pernyataan Keluar (option out) yang ditujukan kepada Kepala Panitera PHI pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar cq. Panitera Pengganti perkara a quo dan para Penggugat cq. Kuasa Hukum para Penggugat paling lama 14 (empat belas) hari setelah Notifikasi diumumkan.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Sah Aksi Mogok Kerja yang dilakukan oleh para Penggugat dan Kelompoknya pada tanggal 15 s/d. 25 November 2007 ;
- 3 Menyatakan Tindakan Tergugat yang memotong upah para Penggugat dan Kelompoknya pada Bulan Gaji November 2007 adalah Tindakan Balasan dari Tergugat dan melanggar Ketentuan Pasal 144 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan ;
- 4 Menyatakan Tindakan Tergugat yang memotong upah para Penggugat dan Kelompoknya pada bulan Gaji November 2007 adalah tidak sah dan melawan hukum ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat dan Kelompoknya secara tunai dan seketika yang terdiri dari :
 - Kerugian Materil sebesar Rp 804.990.919,00 (delapan ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas Rupiah) ;
 - Kerugian Imateril sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).
- 6 Membentuk komisi pembayaran ganti rugi (Komisi) yang anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan komposisi sebagai berikut :
 - 1 (satu) orang yang mewakili para Penggugat sebagai anggota Komisi ;
 - 1 (satu) orang dari Tergugat sebagai anggota Komisi ;
 - 1 (satu) orang dari Hakim dari PHI pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar yang khusus ditunjuk untuk itu sebagai anggota komisi merangkap ketua komisi ;
- 7 Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini ;



- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad) ;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan perbaikan/perubahan gugatan sebagaimana tersebut dalam perubahan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat bukanlah merupakan gugatan yang dapat diajukan secara perwakilan kelompok (class action) melainkan gugatan serikat buruh ;
- 2 Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat bukanlah merupakan gugatan yang dapat diajukan secara perwakilan kelompok (class action) sebagaimana di atur dalam Perma 1/2002, khususnya ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ;
- 3 Majelis hakim wajib memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan dalam awal proses pemeriksaan persidangan, apakah gugatan para Penggugat telah memenuhi kriteria gugatan perwakilan kelompok berdasarkan Perma No.1 Tahun 2002 ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 02/PHI.G/2011/PN.Mks., tanggal 23 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat pada tanggal 23 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/PHI.G/2011/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juni 2011;



Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 7 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi / para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1 *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum :

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) oleh karena tidak memandang bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum juga berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial kecuali terhadap ketentuan-ketentuan yang secara khusus diatur dalam UU PPHI ;

Hal ini sebagaimana yang tergambar pada pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* hlm. 96 (sembilan puluh enam) nomor 1 (satu) berbunyi :

“Bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerja/buruh dengan pengusaha seperti Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta semua Peraturan Pelaksananya dan Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur, menjelaskan bahkan tidak mengenal istilah “kelompok” baik itu menyangkut tentang “anggota kelompok” maupun “wakil kelompok” “;

Begitupula pada Pertimbangan pada hlm 97 (sembilan puluh tujuh) nomor 2 (dua) :

“Bahwa tidak satupun pasal dari Undang-undang tersebut di atas yang mendefinisikan pekerja/buruh adalah merupakan atau sama dengan kelompok. Bahkan jika pekerja/buruh tersebut terdiri dari satu orang atau bahkan ribuan orang maka penyebutan untuk mereka tetap pekerja/buruh dan jika terorganisir dalam serikat pekerja/serikat buruh, maka penyebutannya menjadi Anggota Serikat pekerja/serikat buruh dan atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh bukan “kelompok” “ ;



Begitupula pada pertimbangan pada hlm 97 (sembilan puluh tujuh) nomor 5 (lima) berbunyi :

“Bahwa adanya hubungan kerja inilah yang membedakan antara “para Penggugat” dalam pengertian sebagai Pekerja/Buruh atau serikat Pekerja/Serikat Buruh menurut Undang-Undang 2 Tahun 2004 yang memiliki hubungan kerja dan kepentingan hukum langsung dengan Tergugat, dengan “para Penggugat” dalam pengertian kelompok, baik sebagai “Wakil Kelompok” maupun “anggota kelompok” menurut PERMA GPK karena tidak memiliki hubungan kerja dan kepentingan hukum langsung dengan Tergugat”“;

Sementara Pasal 57 UU PPHI menyatakan :

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”“;

Kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* dimaksud oleh karena tidak menerapkan Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (“PERMA GPK”) terhadap fakta adanya 1057 (seribu lima puluh tujuh) orang Penggugat yang memiliki fakta dan dasar hukum hukum yang sama yakni sama-sama menderita kerugian akibat pemotongan upah dalam bentuk no pay for sift code, sick leave dan/atau no pay (pengurang) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi pada bulan gaji November 2007 ;

Padahal seharusnya *Judex Facti* menerapkan PERMA GPK terhadap fakta tersebut oleh karena UU PPHI tidak mengatur secara khusus mengenai metode pengajuan gugatan yang melibatkan Penggugat dalam jumlah yang sangat banyak yang memiliki fakta dan dasar hukum yang sama, sehingga dengan demikian harus mengacu pada aturan-aturan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang dalam hal ini adalah PERMA GPK ;

- 2 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan *asas Lex Specialis Derogat Legi Generale* oleh karena berdasarkan *asas Lex Specialis Derogat Legi Generale* yang bermakna “Selama Suatu Peristiwa Tidak Diatur Secara Khusus Dalam Ketentuan/Peraturan Perundang-Undangan Khusus Maka Yang Berlaku Terhadap Peristiwa tersebut Adalah Ketentuan/Peraturan Perundang-Undangan Umum” ;

Hal ini juga tergambar dari pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 96 (sembilan puluh enam) nomor 1 (satu) dan halaman 97 (sembilan



puluh tujuh) nomor 2 (dua) serta pada halaman 97 (sembilan puluh tujuh) nomor 5 (lima) seperti yang telah terurai di atas (point 1) ;

Bahwa oleh karena dalam UU PPHI tidak mengatur secara khusus mengenai teknis pengajuan gugatan atas peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum/hak yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak (yang mencapai ribuan orang) maka yang dijadikan acuan adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum ;

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan di Lingkungan peradilan Umum telah diatur mengenai pengajuan gugatan atas peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum/hak yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak yakni diatur oleh PERMA GPK ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan *asas Lex Specialis Derogat Legi Generale*, maka pengajuan Gugatan Perselisihan Hak dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok di Pengadilan Hubungan Industrial adalah dimungkinkan dan memiliki dasar hukum ;

3 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum oleh karena memandang bahwa PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara GPK hanya dapat diberlakukan atau diterapkan pada Lingkungan Peradilan Umum, dengan kata lain Majelis Hakim *Judex Facti* tidak melihat PERMA GPK sebagai bagian dari Hukum Acara yang juga berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial ;

Hal ini juga tergambar dari pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 96 (sembilan puluh enam) nomor 1 (satu) dan halaman 97 (sembilan puluh tujuh) nomor 2 (dua) serta pada halaman 97 (sembilan puluh tujuh) nomor 5 (lima) sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Apabila dilihat dari sudut pandang sejarah dan politik hukum diterbitkannya PERMA GPK, tidak ada pembatasan penerapan PERMA GPK yang hanya sebatas di Lingkungan Peradilan Umum ;

Selama suatu peristiwa menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal terhadap orang banyak yang sangatlah tidak efektif dan efisien penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal terhadap orang banyak tersebut yang memiliki fakta dasar hukum, dan Tergugat yang sama apabila



diajukan serta diselesaikan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan maka terhadapnya dapat diterapkan PERMA GPK ;

Begitupun pada pengadilan Hubungan Industrial yang dalam Perkara a quo melibatkan 1075 (seribu tujuh puluh lima) orang Penggugat yang memiliki fakta dan dasar hukum yang sama yakni sama-sama menderita kerugian akibat pemotongan upah dalam bentuk no pay for sift code, sick leave dan/ atau no pay (pengurang) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi pada bulan gaji November 2007, sehingga untuk mengefektifkan dan mengefisienkan gugatan dan hukum acara memang memungkinkan hal tersebut (berdasarkan Pasal 57 UU PPHI dan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generale) maka digunakanlah Metode Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) ;

Dari rentetan pertimbangannya, Majelis Hakim *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa PERMA GPK bukanlah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial oleh karena :

- Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerja/ buruh, tidak ada satupun yang pasal yang mengatur mengenai istilah Gugatan Perwakilan Kelompok ;
- Berbeda materi perkara yang diatur oleh UU PPHI dan PERMA GPK ;

Disini sangat nampak bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mampu membedakan mana yang dimaksud dengan hukum formil dan mana yang dimaksud dengan hukum materil. Majelis Hakim *Judex Facti* ternyata mempunyai pemahaman bahwa PERMA GPK adalah instrument hukum materil yang membatasi penerapannya hanya di Peradilan Umum. Majelis Hakim *Judex Facti* tidak melihat PERMA GPK sebagai hukum formil yang tidak hanya berlaku di Peradilan Umum tetapi juga berlaku untuk semua perkara keperdataan selama persyaratan-persyaratan bersifat massal, memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum, serta syarat-syarat lain yang digariskan oleh PERMA GPK terpenuhi ;

Demikian pula bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dengan mendasarkan putusannya hanya pada ketidakadaan istilah “kelompok” dan ketidakadaan pasal yang menyebut Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) di UU PPHI. Padahal semestinya dan memang seharusnya demikian bahwa Penerapan GPK di Pengadilan Hubungan Industrial adalah suatu bentuk penemuan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 57 UU PPHI dan asas Lex Specialis Derogat legi Generale yang kemudian dikaitkan dengan



adanya fakta 1075 (seribu tujuh puluh lima) orang Penggugat yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum ;

Jika Majelis Hakim *Judex Facti* betul-betul memahami penafsiran Pasal 57 UU PPHI dan *asas Lex Specialis Derogat Legi Generale*, maka Majelis Hakim *Jufex Facti* tentu tidak akan mempermasalahkan mengenai penerapan metode Gugatan Perwakilan Kelompok di Pengadilan Hubungan Industrial dan akan melihat PERMA GPK sebagai bagian dari hukum acara yang juga berlaku di UU PPHI ;

Bahwa GPK/Class Action Dapat Diterapkan Untuk Segala Jenis Gugatan Sepanjang Bersifat Massal Dan Memiliki Kesamaan Fakta Dan Dasar Hukum ;

Para Pemohon Kasasi semakin memperjelas adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* yang menganggap dan memahami bahwa GPK/class action hanya dapat diterapkan di Peradilan Umum, Majelis Hakim *Judex Facti* tampaknya tidak melihat GPK/class action sebagai hukum formil yang berkenaan dengan metode gugatan, tetapi melihat GPK/class action sebagai hukum materil yang mengatur tentang pokok perkara. Hal demikian tergambar dari pertimbangannya pada nomor 5 (lima) halaman 97 (sembilan puluh tujuh) ;

Terkait dengan Penerapan metode Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) di Pengadilan Hubungan Industrial, berikut ini para Pemohon Kasasi akan mengemukakan pendapat dari beberapa pakar hukum (doktrin) yang menjadi salah satu sumber hukum sekaligus sebagai referensi teori bagi para Pemohon Kasasi dalam menyusun kerangka pikir bahwa metode Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) dapat diterapkan di Pengadilan Hubungan Industrial ;

Pertama, para Pemohon Kasasi mengutip Pendapat Harifin A. Tumpa yang mengemukakan :

“Tujuan yang mendasar dari gugatan class action tersebut, dapat dipahami melalui satu kata, yaitu “efisiensi”, tata cara gugatan Class Action seharusnya hanya digunakan bila tata acara ini akan menghasilkan efisiensi baik bagi para pihak yang bersengketa, dirugikan, dituntut, dan terutama efisiensi bagi pengadilan. Jika para pihak dan kalangan hukum memahami tujuan class action yang unik ini hanya akan dipakai secara selektif dalam keadaan tertentu yang tepat. Seperti adanya kerugian atau cedera massal” ;

Dari pendapat Harifin A. Tumpa di atas, dapat dipahami bahwa untuk menentukan suatu peristiwa hukum dapat atau tidaknya diterapkan Class Action/GPK digantungkan dari apakah peristiwa tersebut mendatangkan



kerugian secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak (yang mencapai ribuan orang) atau tidak. Penerapan Class Action bukanlah digantungkan dari apakah peristiwa tersebut termasuk dalam kompetensi pengadilan umum atau kompetensi pengadilan khusus ;

Dengan demikian meskipun peristiwa tersebut merupakan kompetensi dari Pengadilan Khusus ex : Pengadilan Hubungan Industrial, namun oleh karena melibatkan ribuan orang Penggugat yang memiliki kesamaan dasar dan fakta hukum, maka guna “efisiensi” dan “efektivitas” pengadilan, digunakanlah tata acara Class Action/GPK (yang sebagaimana diatur dalam PERMA GPK) di Pengadilan Hubungan Industrial ;

Pendapat yang kedua dari Susanti Adi Nugroho yang para Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut :

“Kemudian juga muncul problem baru, apakah pelanggaran-pelanggaran diluar ketentuan undang-undang yang telah dimungkinkan untuk diajukan secara Class Action dapat juga diajukan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok ini, karena PERMA No. 1 Tahun 2002 diadopsi dari negara-negara common law system terutama dari Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, sedangkan di Amerika Serikat sendiri hampir semua pelanggaran undang-undang sepanjang menimbulkan korban yang banyak dapat diajukan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok” ;

Dalam artikelnya yang lain, Susanti Adi Nugroho juga memaparkan :

“Penulis berpendapat bahwa mekanisme Gugatan Class Action dapat diterapkan untuk segala jenis gugatan sepanjang persyaratan mekanisme gugatan class action. Seperti halnya di Amerika Serikat dan Kanada, class action meliputi kasus-kasus yang bervariasi secara luas seperti :

- Aksi pemecatan massal yang salah setelah pengambilalihan perusahaan ;
- Perbuatan melawan hukum misalnya meliputi kasus tanggung jawab produk misalnya produk alat pacu jantung yang malfungsi, transplatasi payudara, dan lain sebagainya ;
- Karyawan suatu perusahaan yang menderita kerugian karena praktik-praktik diskriminasi yang tidak adil (discrimination) seperti perbedaan ras, umur, gender ;
- Kasus-kasus kontrak meliputi class action konsumen misalnya melawan perusahaan-perusahaan kartu kredit yang menetapkan bunga



secara illegal, penyesatan dalam pembangunan perumahan, tidak dibayarnya manfaat asuransi ;

- Perkara-perkara yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia ;
- Pasien yang mengonsumsi obat-obatan yang tidak diberi penjelasan cukup yang memberikan efek samping yang berbahaya ;
- Kerugian-kerugian yang disebabkan bisnis curang atau pelanggaran UU Anti Monopoli ;
- Pedagang dan pembeli yang membeli produk kemahalan karena praktik-praktik persaingan curang yang dilakukan perusahaan ;
- Investor yang menjadi korban karena perbuatan curang dalam kaitannya dengan pembelian saham dan securities lainnya ;

Dapat disimpulkan bahwa class action di Amerika Serikat beragam dan sangat luas, semua perkara dapat diajukan secara class action asal memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain mewakili jumlah korban yang sangat banyak, yang mana tidak efektif jika diajukan secara sendiri-sendiri yang banyak terjadi mula-mula gugatan diajukan oleh kelompok yang lebih kecil, kemudian bergabung dengan yang lain dan menjadi kelompok yang lebih besar, karena mempunyai kesamaan substansi hukum dan kesamaan fakta di antara anggota kelasnya” ;

Pendapat Susanti Adi Nugroho semakin menegaskan bahwa PERMA GPK tidak hanya dibatasi penerapannya di Pengadilan Umum tetapi dimungkinkan pula untuk diterapkan terhadap semua peristiwa hukum yang mendatangkan kerugian yang bersifat serentak, massal serta memiliki kesamaan dasar dan fakta hukum termasuk dapat diterapkan di Pengadilan Hubungan Industrial (ex : perselisihan hak yang menimbulkan kerugian bagi ribuan orang buruh yang dasar dan fakta hukumnya sama) ;

Dari pertimbangannya-pertimbangannya terlihat bahwa *Judex Facti* belum memahami secara komprehensif mengenai sejarah dan makna politik hukum yang terkandung di dalam PERMA GPK, kekurangpahaman *Judex Facti* semakin jelas tergambar dari pemahamannya bahwa PERMA GPK hanya dapat diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang termasuk dalam kompetensi Pengadilan Umum ;

Bahwa selain keberatan yang diuraikan secara per-sub di atas, para Pemohon Kasasi juga akan menguraikan tanggapan secara per-item pertimbangan atas beberapa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sebagai berikut :



4 Kesalahan Penerapan Hukum pada pertimbangan hukum nomor 1 (satu), nomor 6 (enam), nomor 7 (tujuh) dan 8 (delapan) ;

Pertimbangan hlm. 96 (sembilan puluh enam) nomor 1 (satu) berbunyi :

"Bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerja/buruh dengan pengusaha seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta semua Peraturan Pelaksananya dan Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur, menjelaskan bahkan tidak mengenal istilah "kelompok" baik itu menyangkut tentang "anggota kelompok" maupun "wakil kelompok" "

Pertimbangan hlm. 98 (sembilan puluh delapan) nomor 6 (enam) berbunyi :

"Bahwa dalam hubungan kerja inilah dapat terjadi perselisihan yaitu perselisihan hubungan industrial yang timbul karena adanya perbedaan yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan" ;

Pertimbangan hlm. 98 (sembilan puluh delapan) nomor 7 (tujuh) berbunyi :

"Bahwa oleh karena itu prinsip dan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai perselisihan hubungan industrial adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pihak-pihak dalam perselisihan tersebut harus terdapat hubungan kerja" ;

Pertimbangan hlm. 98 (sembilan puluh delapan) nomor 8 (delapan) berbunyi :

"Bahwa berdasarkan Pasal 55 Jo. Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum, bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- *Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak ;*
- *Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan ;*
- *Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja ;*
- *Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan" ;*



Terhadap pertimbangan keempat hukum diatas Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak mampu membedakan antara mana yang disebut dengan hukum materil dan mana yang disebut dengan hukum formil ;
 - Bahwa Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta semua Peraturan Pelaksananya dan Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek adalah Hukum Materil dalam bidang hukum perburuhan. Sementara Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial beserta hukum acara yang berlaku pada peradilan umum adalah Hukum Fomil dalam bidang hukum perburuhan ;
 - Bahwa pada prinsipnya, Hukum Acara yang berlaku Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini” (prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generale* dan pasal 57 UU 2/2004 tentang PPHI) ;
 - Bahwa oleh karena UU No. 2/2004 tentang PPHI tidak mengatur mengenai metode pengajuan gugatan yang melibatkan ribuan orang Penggugat (in casu 1075/seribu tujuh puluh lima orang Penggugat), maka digunakanlah metode pengajuan gugatan massal yang berlaku pada peradilan umum yang dalam hal ini PERMA GPK ;
 - Bahwa dari pertimbangannya tersebut sangat jelas dimana Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memahami prinsip/*asas Lex Specialis Derogat Legi Generale*.
- 5 Kesalahan Penerapan Hukum pada Pertimbangan Hukum Nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (Lima).

Pertimbangan pada hlm 97 (sembilan puluh tujuh) nomor 2 (dua) :

“Bahwa tidak satupun pasal dari Undang-undang tersebut di atas yang mendefinisikan pekerja/buruh adalah merupakan atau sama dengan kelompok. Bahkan jika pekerja/buruh tersebut terdiri dari satu orang atau bahkan ribuan orang maka penyebutan untuk mereka tetap pekerja/buruh dan jika terorganisir dalam serikat pekerja/serikat buruh, maka penyebutannya



menjadi Anggota Serikat pekerja/serikat buruh dan atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh bukan “kelompok” ;

Pertimbangan pada hlm. 97 (sembilan puluh tujuh) nomor 3 (tiga) :

*“Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dengan jelas mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Pekerja/Buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”
“ ;*

Pertimbangan pada hlm 97 (sembilan puluh tujuh) nomor 4 (empat) berbunyi :

“Bahwa upah atau imbalan dalam bentuk lain tersebut diterima oleh Pekerja/buruh karena ada hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 13 Tahun 2003” ;

Pertimbangan pada hlm 97 (sembilan puluh tujuh) nomor 5 (lima) berbunyi :

“Bahwa adanya hubungan kerja inilah yang membedakan antara “para Penggugat” dalam pengertian sebagai Pekerja/Buruh atau serikat Pekerja/Serikat Buruh menurut Undang-undang 2 Tahun 2004 yang memiliki hubungan kerja dan kepentingan hukum langsung dengan Tergugat, dengan “para Penggugat” dalam pengertian kelompok, baik sebagai “Wakil Kelompok” maupun “anggota kelompok” menurut PERMA GPK karena tidak memiliki hubungan kerja dan kepentingan hukum langsung dengan Tergugat” ;

Terhadap keempat pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari pertimbangannya tersebut, menandakan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* gagal/tidak mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ;
- Bahwa para Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat) mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (perselisihan hak) dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok yang kemudian didaftar di Sub-Kepaniteraan Pengadilan Hubungan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar oleh karena Materi Gugatan a quo yakni perselisihan hak adalah termasuk dalam kompetensi Pengadilan



Hubungan Industrial. Namun karena melibatkan 1075 (seribu tujuh puluh lima) orang Penggugat sehingga digunakanlah metode Gugatan Perwakilan Kelompok selain karena hukum acara memungkinkannya juga dengan tujuan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan gugatan ;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex* telah melakukan kesalahan penerapan hukum karena keliru dalam menerapkan dan menafsirkan keterkaitan antara adanya fakta hukum 1075 (seribu tujuh puluh lima) orang buruh dengan istilah “kelompok” yang terdapat dalam PERMA GPK, adapun mengenai pendefinisian “1075 (seribu tujuh puluh lima) orang pekerja/buruh” sebagai “kelompok” dalam perkara a quo adalah bentuk penerapan istilah “kelompok” yang terdapat dalam PERMA GPK terhadap fakta hukum adanya 1075 (seribu tujuh puluh lima) orang pekerja/buruh yang sama-sama menderita kerugian akibat pemotongan upah dalam bentuk no pay for sift code, sick leave dan/ atau no pay (pengurang) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi pada bulan gaji November 2007 ;

2 *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-Syarat yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang Mengancam Kelalaian Itu dengan Batalnya Putusan yang bersangkutan ;

- 1 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mengarahkan para pihak untuk melakukan perdamaian, tindakan ini jelas melanggar kewajiban hukum yang digariskan oleh hukum acara yang berlaku bagi semua sengketa perdata (termasuk sengketa/Perselisihan Hubungan Industrial) sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 130 HIR/154 RBg Jo. PERMA NO. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Demikian untuk selanjutnya para Pemohon Kasasi tegaskan berdasarkan PERMA Mediasi bahwa dengan dilaluinya proses mediasi maka membawa konsekuensi yuridis putusan tersebut terancam batal demi hukum ;

- 2 Bahwa *Judex Facti* tidak mengindahkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Khusus ;

Bahwa pengajuan Gugatan Perselisihan Hak yang menggunakan mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) ini juga didasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata



Khusus angka (Romawi) II Pengadilan Hubungan Industrial huruf A nomor 1 sub bagian 2 (5) Jo. SK. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : KMA/032/SKIV/2006 Tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan ;

“Gugatan yang diajukan oleh sekelompok Penggugat mengikuti ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok” ;

- 3 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* juga melanggar prosedur dismissal yang digariskan oleh Pasal 5 Ayat (1) Dan Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara GPK ;

Bahwa untuk menguji sah atau tidaknya penggunaan metode Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) maka pengujian tersebut harus dinilai melalui mekanisme/ proses dismissal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Dan Ayat (2) Jo. Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara GPK ;

Pasal 5 PERMA No 1 Tahun 2002 tentang Acara GPK mengatur bahwa :

Ayat (1) : *“Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2” ;*

Ayat (2) : *“Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3” ;*

Jadi seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* di persidangan pertama melakukan pemeriksaan mengenai apakah gugatan Perselisihan Hak dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara GPK atau tidak ;

Namun ternyata hal demikian tidak dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* pada persidangan pertama, bahkan ketika hal ini dipertanyakan oleh Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) mengenai agenda prosedur dismissal sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara GPK, Majelis Hakim *Judex Facti* justru melanjutkan proses perkara ke agenda jawab menjawab ;

- 4 Majelis Hakim *Judex Facti* juga mengadili dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara GPK ;



Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara GPK :

“Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan” ;

Ketentuan ini menggariskan bahwa apabila Majelis Hakim menilai bahwa metode Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara GPK, maka harus dituangkan dalam bentuk penetapan, tetapi pada kenyataannya dalam a quo Majelis Hakim *Judex Facti* menilai tidak sahnya Metode Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh para Penggugat (sekarang para Pemohon Kasasi) dengan menuangkannya dalam bentuk Putusan ;

Berdasar point 3 dan 4 tersebut, menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam beberapa ratio decidendinya merupakan materi yang terkait dengan Mekanisme Class Action (GPK) yang seharusnya dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan bukan dala bentuk putusan sela, proses acara dalam perkara a quo belum memasuki tahapan jawaban dan atau eksepsi dan pokok perkara, masih terkait dengan tanggapan mengenai dapat atau tidaknya GPK diterapkan dalam perkara a quo, sementara mejelis hakim telah mengakhiri proses tersebut lewat putusan No.02/PHI.G/2011/PN. Mks ;

5 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mengindahkan atau dalam arti lalai dalam mengikuti cara mengadili sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 88 jo Pasal 89 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI ;

Bahwa menurut Pasal 88 ayat (1) UU PPHI, Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan Majelis Hakim ;

Selanjutnya Pasal 89 Ayat (1) UU PPHI menggariskan bahwa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Majelis Hakim (vide : Pasal 88 Ayat 1 UU PPHI), maka Ketua Majelis Hakim harus sudah melakukan sidang pertama ;

Bahwa pada kenyataannya ternyata, Majelis Hakim *Judex Facti* baru mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 April 2011, hal mana telah sangat jauh melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dan imperatif oleh Pasal 89 Ayat (1) UU PPHI . Hal demikian jelas melanggar cara mengadili sebagaimana yang diatur dalam undang-undang i.c UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI ;



Bahwa oleh karena dalam putusannya tertanggal 23 Mei 2011, Majelis Hakim *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
“*Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard)*”, hal mana amar tersebut didasarkan pada pertimbangan tidak dapat diterapkannya metode Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana yang dikemukakan di atas, sehingga dengan demikian sangat beralasan apabila Petitum dalam Memori Kasasi ini, Para Pemohon Kasasi juga meminta agar Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar agar melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara atas perkara No : 02/PHI.G/2011/PN.Mks. ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan kasasi Pemohon tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* tidak salah atau tidak keliru dalam penerapan hukum serta keberatan kasasi para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga permohonan kasasi Pemohon ditolak ;

Bahwa gugatan yang diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial tidak dikenal perwakilan kelompok pekerja, karena sebagai pihak yang mewakili gugatan para Pekerja sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat memberikan kuasa kepada Pengurus Serikat Pekerja atau jika bukan anggota dari serikat pekerja dapat memberikan kuasa kepada kuasa yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau secara sendiri-sendiri menggugat di Pengadilan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **ANDI KARMAN, dkk.**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, namun karena nilai gugatan ini dibawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. ANDI KARMAN, 2. ABDUL MALIK, 3. HAERUDDIN HASAN** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 14 Agustus 2012**, oleh **H. Yulius, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.** dan **Arief Soedjito, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Jono Sihono, SH.

ttd./

Arief Soedjito, SH. MH.

Ketua,

ttd./

H. Yulius, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(**RAHMI MULYATI, SH., MH**)
Nip. 19591207 1985 12 2 002